



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 000-7 / 306 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026-2030

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Semarang dan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 173);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026-2030.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Semarang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2026

WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7 /306 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2026-2030

1	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pembangunan Manusia
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Pengukuran perbandingan AHH, RLS, HLS dan pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan manusia
	Formulasi Perhitungan	:	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}} \times 100$
	Intepretasi	:	Dalam skala 0-100, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam pembangunan kualitas hidup
	Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
Tipe Indikator	:	Positif	
2	Tujuan	:	Menurunnya kemiskinan secara inklusif
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat Kemiskinan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang diukur berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.
	Formulasi Perhitungan	:	Angka kemiskinan: (Jumlah Penduduk Miskin / Jumlah Penduduk Total) X 100
	Intepretasi	:	Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin baik kondisi kesejahteraan masyarakat
	Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
Tipe Indikator	:	Negatif	
3	Tujuan	:	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing
	Indikator Kinerja Utama	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proses kenaikan pendapatan per kapita daerah dalam jangka panjang dan merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
	Formulasi Perhitungan	:	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai LPE, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berkembang dan produksi barang serta jasa meningkat, yang berpotensi mendorong peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah nilai LPE mengindikasikan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi yang dapat berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
	Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
Tipe Indikator	:	Positif	

4	Tujuan	:	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kinerja infrastruktur daerah yang terwujud dari capaian rencana pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah (X1) dan pengembangan kawasan strategis daerah (X2)
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Nilai X1} \times 0,6) + (\text{Nilai X2} \times 0,4) / 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai indikator, semakin optimal pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, semakin belum optimal pencapaian pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan strategis daerah.
	Sumber Data	:	Bappeda Kota Semarang
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
	Tipe Indikator	:	Positif

5	Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Reformasi Birokrasi
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, bertanggung jawab, dan meningkatkan tata kelola yang baik.
	Formulasi Perhitungan	:	Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik, Nilai RB General mencerminkan capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi umum, tingkat implementasi kebijakan, dan capaian strategis lainnya, Nilai RB Tematik mencerminkan strategi pembangunan reformasi birokrasi tematik dan dampak yang dicapai dari implementasinya
	Intepretasi	:	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi AA (Sangat Memuaskan) = >100 A (Memuaskan) = 80-100 A- (Memuaskan dengan catatan) = 80-100 BB (Sangat Baik) = 70-80 B (Baik) = 60-70 CC (Cukup) = 50-60 C (Kurang) = 30-50 D (Sangat Kurang) = 0-30
	Sumber Data	:	KemenPAN RB
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
	Tipe Indikator	:	Positif

6	Sasaran	:	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pendidikan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan dengan kompositnya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
	Formulasi Perhitungan	:	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p>HLS maks = 18 tahun, HLS min = 0 tahun RLS maks = 15 tahun, RLS min = 0 tahun</p>
	Intepretasi	:	Nilai indeks berada pada rentang 0-1. Semakin mendekati 1, berarti capaian pendidikan semakin baik
	Sumber Data	:	Bappeda Kota Semarang
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
	Tipe Indikator	:	Positif

7	Sasaran	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kesehatan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Cerminan dari tingkat kesehatan di suatu wilayah. Indeks kesehatan disusun berdasarkan AHH yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup
	Formulasi Perhitungan	:	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>AHH maks = 85 tahun, AHH min = 20 tahun</p>
	Intepretasi	:	Nilai indeks berada pada rentang 0-1. Semakin mendekati 1, berarti capaian kesehatan semakin baik
	Sumber Data	:	Bappeda Kota Semarang
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
	Tipe Indikator	:	Positif

8	Sasaran	:	Menurunnya dampak perubahan iklim
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
	Formulasi Perhitungan	:	$IKLHi = (0,376 \times IKAi) + (0,405 \times IKUi) + (0,219 \times IKLi)$
	Intepretasi	:	Kategori 1. Baik $85 < x \leq 100$ 2. Sedang $60 < x \leq 85$ 3. Kurang $0 < x \leq 60$
	Sumber Data	:	Hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang diperoleh dari pengukuran terhadap sampel lingkungan dan dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi. Dasar pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
	Tipe Indikator	:	Positif

9	Sasaran	:	Menurunnya banjir dan rob
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Kawasan Banjir dan Rob
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Perbandingan antara wilayah (permukiman, jalan dan persawahan) yang mengalami banjir dan rob dibandingkan dengan luas seluruh wilayah Kota Semarang dalam persen
	Formulasi Perhitungan	:	Persentase Kawasan Banjir & Rob Luas Wilayah (permukiman, jalan dan persawahan) yang mengalami banjir & rob/luas seluruh wilayah Kota Semarang x 100
	Intepretasi	:	Semakin tinggi frekuensi dan luas kejadian banjir dan rob, menunjukkan tingkat kerentanan wilayah yang semakin besar terhadap risiko bencana hidrometeorologi, yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, infrastruktur, permukiman, serta kesehatan masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi dan luas kejadian banjir dan rob, menunjukkan semakin baiknya sistem pengendalian banjir, pengelolaan drainase, penataan ruang, serta efektivitas upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan yang dilakukan pemerintah daerah.
	Sumber Data	:	Dinas Pekerjaan Umum
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
	Tipe Indikator	:	Negatif



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7 / 306 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2026-2030

1	Perangkat Daerah	:	Dinas Pendidikan
a	Tujuan	:	Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata
	Indikator Kinerja Utama	:	Rata-rata lama sekolah (RLS)
	Satuan	:	Tahun
	Definisi Operasional	:	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menenpuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani (tanpa apakah pernah tinggal kelas atau tidak). Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang sudah dicapai/ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas.
	Formulasi Perhitungan	:	$RLS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke - i)$
			P15+ = Jumlah penduduk umur \geq 15 tahun
	Intepretasi	:	RLS menggambarkan jumlah tahun rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas pernah menempuh pendidikan formal. RLS tinggi berarti sebagian besar penduduk minimal tamat SMP atau SMA, menunjukkan keberhasilan akses pendidikan bertahun-tahun sebelumnya. RLS rendah menandakan masih banyak penduduk berpendidikan SD atau kurang, yang berimplikasi pada rendahnya kompetensi dasar, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja.
	Sumber Data	:	Sumber data capaian RLS dari BPS Kota Semarang
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
Tipe Indikator	:	Positif	
b	Tujuan	:	Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata
	Indikator Kinerja Utama	:	Harapan lama sekolah (HLS)
	Satuan	:	Tahun
	Definisi Operasional	:	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Formulasi Perhitungan	:	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7,8, ..., n)</p>
Intepretasi	:	HLS mencerminkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke depan, jika pola partisipasi sekolah saat ini tetap berjalan. HLS tinggi (misalnya di atas 13 tahun) menunjukkan peluang besar bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga SMA bahkan perguruan tinggi. HLS rendah mengindikasikan masih ada hambatan akses, seperti kemiskinan, jarak sekolah, keterbatasan fasilitas, atau rendahnya partisipasi jenjang atas
Sumber Data	:	Sumber data capaian HLS dari BPS Kota Semarang
Frekuensi	:	Setiap Tahun
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Indeks komposit yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dasar oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pelayanan pendidikan dasar wajib dipenuhi sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah indikator SPM yang tercapai Indeks SPM = $\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator SPM yang ditetapkan}} \times 100$
	Intepretasi	:	Indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baiknya kualitas proses dan keluaran pendidikan, sedangkan indeks yang rendah menjadi sinyal kuat bahwa layanan pendidikan masih menghadapi tantangan struktural.
	Sumber Data	:	Sumber data capaian dari Rapor Pendidikan Kemendikdasmen
	Frekuensi	:	Setiap Tahun
Tipe Indikator	:	Positif	

2	Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan
a	Tujuan	:	Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan
	Indikator Kinerja Utama	:	Angka harapan hidup
	Satuan	:	Tahun
	Definisi Operasional	:	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
	Formulasi Perhitungan	:	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
	Intepretasi	:	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
	Sumber Data	:	BPS
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	:	Jumlah kematian ibu
	Satuan	:	Orang
	Definisi Operasional	:	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama.

Intepretasi	:	Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kasus kematian ibu sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Kasus kematian ibu yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat; 3. Pendidikan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan; 4. Status Gizi: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah
Sumber Data	:	Pelaporan MPDN (Dinkes)
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Negatif

c	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	:	Angka kematian balita
	Satuan	:	Per 1000 kelahiran hidup
	Definisi Operasional	:	Jumlah kematian anak usia 0–59 bulan yang berdomisili di Kota Semarang pada tahun berjalan per 1.000 kelahiran hidup penduduk Kota Semarang pada tahun yang sama. Catatan operasional: Termasuk seluruh kematian neonatal (0–27 hari), post-neonatal (28–364 hari), dan balita (12–59 bulan). Kelahiran hidup mengacu pada bayi lahir dengan tanda kehidupan (napas/denyut jantung), tidak termasuk lahir mati (stillbirth). Gunakan pendekatan berbasis domisili (kematian atau kelahiran yang terjadi di luar daerah tetap dihitung jika penduduk Kota Semarang) dan lakukan deduplikasi lintas sumber (Puskesmas–RS–Disdukcapil).

<p>Formulasi Perhitungan</p>	<p>: Rumus dasar: $AKABA = (\text{Jumlah kematian balita usia 0–59 bulan pada tahun } t / \text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun } t) \times 1.000$</p> <p>Definisi pembilang & penyebut: Pembilang: total kematian penduduk usia 0–59 bulan (domisili Semarang) pada tahun t, hasil konsolidasi Puskesmas/RS + akta kematian Disdukcapil (setelah pembersihan ganda). Penyebut: total kelahiran hidup penduduk (domisili Semarang) pada tahun t, hasil konsolidasi fasyankes + akta kelahiran Disdukcapil (setelah pembersihan).</p> <p>Contoh singkat: 120 kematian balita dan 35.000 kelahiran hidup → $AKABA = (120 / 35.000) \times 1.000 = 3,43\%$.</p>
<p>Intepretasi</p>	<p>: Lebih rendah lebih baik.</p> <p>Disarankan analisis disagregasi: kecamatan/kelurahan, jenis kelamin, kelompok umur kematian (0–27 hr; 28–364 hr; 12–59 bln), tempat kematian (RS/rumah), serta penyebab utama (ICD-10) untuk intervensi spesifik (KIA, gizi, imunisasi, sanitasi).</p> <p>Bandingkan dengan baseline kota dan target RPJMD/Renstra/SDGs yang berlaku.</p> <p>Untuk meminimalkan fluktuasi, dapat ditampilkan juga rata-rata bergerak 12 bulan.</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>: Puskesmas/SIMPUS & jejaring: register kohort ibu-bayi/balita, PWS-KIA, laporan kematian bayi/balita.</p> <p>Rumah Sakit/Klinik/BPM: rekam medis & laporan kematian bayi/balita.</p> <p>Disdukcapil (SIKDA): akta kelahiran dan akta kematian (padanan NIK/KK untuk domisili).</p> <p>SIKDA/Dasbor KIA daerah: konsolidasi rutin (imunisasi, persalinan, kematian balita).</p> <p>Survei/estimasi (untuk triangulasi tren jangka menengah): SDKI/Riskesdas/SUSENAS/SP/Proyeksi BPS.</p> <p>Dokumen pendukung: berita acara rekonsiliasi bulanan/semesteran, daftar pembersihan duplikasi.</p>

Frekuensi	:	Tahunan: angka utama pelaporan Renstra. Bulanan/Traiwulan: monitoring operasional dan rekonsiliasi lintas sumber (Puskesmas–RS–Disdukcapil) termasuk verifikasi domisili, usia saat kematian, dan sebab kematian.
Tipe Indikator	:	Negatif

d	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui <u>pengendalian penyakit</u>
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Persentase penurunan jumlah balita stunting (0–59 bulan) yang tercatat valid pada sistem EPPBGM/e-PPGBM Kota Semarang pada periode pelaporan dibanding periode acuan (tahun sebelumnya atau tahun baseline Renstra). Catatan operasional:</p> <p>Stunting = status TB/U < -2 SD (menggabungkan stunted dan severely stunted) menurut standar WHO yang dihitung sistem.</p> <p>Kasus valid = memiliki identitas balita yang jelas (NIK/ID unik), hasil ukur TB/U sah (tanpa outlier), dan 1 rekaman terakhir per anak pada periode pelaporan.</p> <p>Gunakan domisili Kota Semarang (rekonsiliasi ganda lintas Puskesmas/Posyandu/RS).</p>
	Formulasi Perhitungan	:	(baseline stunting dikurangi stunting pada periode berjalan) dibagi baseline stunting dikali 100%
Intepretasi	:	<p>Nilai positif = terjadi penurunan (perbaikan); negatif = kenaikan kasus/prevalensi (memburuk); 0% = stagnan.</p> <p>Usulan kategorisasi YoY (sesuaikan baseline/target daerah): ≥ 10% : Sangat Baik 5 – <10% : Baik 1 – <5% : Cukup ≤ 0% : Kurang</p> <p>Baca bersama cakupan ukur (mis. target minimal ≥ 85% balita diukur valid/tahun) dan lakukan disagregasi: kecamatan/kelurahan, jenis kelamin, kelompok umur (0–27 hr; 28–364 hr; 12–59 bln).</p>	

Sumber Data	:	EPPBGM/e-PPGBM (dashboard unduhan): jumlah balita terukur valid, jumlah balita stunting valid, per Puskesmas/kelurahan. Puskesmas/Posyandu: register penimbangan & pengukuran, berita acara rekonsiliasi bulanan. RS/klinik/BPM: data rujukan/gizi (bila diintegrasikan). Disdukcapil/SIAK (pendukung): padanan NIK & domisili untuk deduplikasi. (Opsional triangulasi tren jangka menengah) SSGI/Riskedas/SUSENAS.
Frekuensi	:	Bulanan/tri wulanan: monitoring operasional & rekonsiliasi data (cakupan ukur, validasi outlier). Tahunan: angka utama pelaporan Renstra (pilih acuan YoY atau terhadap baseline t_0 , dan gunakan konsisten sepanjang periode Renstra).
Tipe Indikator	:	Positif

e	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	:	Angka populasi bebas penyakit menular
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi penduduk ber-NIK dan berdomisili di Kota Semarang pada tahun berjalan yang tidak tercatat sebagai kasus pada penyakit menular prioritas (kasus terkonfirmasi/probable sesuai definisi operasional surveilans) minimal satu sepanjang periode tersebut. Catatan operasional: Daftar penyakit menular prioritas ditetapkan Pemda (contoh umum: TBC, HIV, DBD/Dengue, Campak-Rubela (PD3I), Malaria autochthonous, Leptospirosis, Hepatitis A/E KLB, Diare/Kolera KLB). Gunakan daftar yang konsisten untuk seri Renstra. Basis domisili: kasus warga Semarang tetap dihitung meski terdiagnosis/dirawat di luar kota. Dedup antar-penyakit/sistem dilakukan di level individu (NIK) agar satu orang yang sakit >1 penyakit hanya dihitung sekali sebagai “terdampak”.

<p>Formulasi Perhitungan</p>	<p>: Rumus utama (berbasis deduplikasi NIK): Persentase populasi bebas = ((Jumlah penduduk domisili - Jumlah penduduk yang tercatat sebagai kasus ≥ 1 penyakit menular prioritas) / Jumlah penduduk domisili) $\times 100\%$</p> <p>Rumus kebalikan (opsional untuk pelaporan pendamping): Proporsi penduduk terdampak = (Jumlah penduduk yang tercatat sebagai kasus ≥ 1 penyakit / Jumlah penduduk domisili) $\times 100\%$, Persentase populasi bebas = $100\% - \text{Proporsi penduduk terdampak}$</p> <p>Kaidah data: Kasus valid: identitas jelas (NIK/ID unik), klasifikasi kasus sesuai definisi, tanggal pertama kali didiagnosis dalam tahun t (gunakan "first event" agar tidak ganda). Jika dedup lintas sistem belum penuh, laporkan catatan keterbatasan dan targetkan peningkatan proporsi kasus bernomor NIK sebagai indikator mutu.</p>
<p>Intepretasi</p>	<p>: Semakin tinggi persentase = semakin kecil proporsi penduduk yang terdampak penyakit menular prioritas.</p> <p>Angka cenderung mendekati 100%; karena itu, tampilkan juga kebalikannya (proporsi penduduk terdampak per 100.000) untuk sensitivitas tren.</p> <p>Disagregasi dianjurkan: kecamatan/kelurahan, jenis kelamin/kelompok umur, serta penyakit (TBC, HIV, DBD, dsb.) untuk penajaman intervensi.</p> <p>Perubahan nilai terpengaruh cakupan deteksi (testing/screening) dan kelengkapan pelaporan; selalu baca berdampingan dengan indikator ketepatan/kelengkapan data (mis. % kasus ber-NIK, % konfirmasi lab).</p>

Sumber Data	:	<p>Surveilans programatik (kasus per individu):</p> <p>SITB (TBC), SIHA (HIV), EWARS/SKDR & Sistem DBD (Dengue), SISMAL (Malaria), PD3I/Measles-Rubella case-based, pelaporan KLB (leptospirosis, hepatitis A/E, diare KLB, dll).</p> <p>Fasyankes: export kasus dari RS/klinik/puskesmas (SIRS/SIMPUS).</p> <p>Disdukcapil (SIAK): denominator penduduk by NIK/umur/jenis kelamin dan padanan domisili untuk dedup.</p> <p>Dokumen pendukung: BA rekonsiliasi bulanan/tri wulanan lintas sistem, daftar pembersihan duplikasi NIK, daftar kasus luar domisili.</p>
Frekuensi	:	<p>Bulanan/tri wulanan: monitoring operasional & rekonsiliasi (dedup NIK, kelengkapan variabel kunci, cakupan deteksi).</p> <p>Tahunan: konsolidasi angka utama Renstra (tetapkan cut-off yang konsisten; mis. 31 Des tiap tahun).</p>
Tipe Indikator	:	Positif

f	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	:	Angka populasi bebas penyakit tidak menular
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Proporsi penduduk ber-NIK dan berdomisili di Kota Semarang pada tahun berjalan yang tidak tercatat sebagai kasus pada penyakit menular prioritas (kasus terkonfirmasi/probable sesuai definisi operasional surveilans) minimal satu sepanjang periode tersebut.</p> <p>Catatan operasional: Daftar penyakit menular prioritas ditetapkan Pemda (contoh umum: TBC, HIV, DBD/Dengue, Campak-Rubela (PD3I), Malaria autochthonous, Leptospirosis, Hepatitis A/E KLB, Diare/Kolera KLB). Gunakan daftar yang konsisten untuk seri Renstra.</p> <p>Basis domisili: kasus warga Semarang tetap dihitung meski terdiagnosis/dirawat di luar kota.</p> <p>Dedup antar-penyakit/sistem dilakukan di level individu (NIK) agar satu orang yang sakit >1 penyakit hanya dihitung sekali sebagai “terdampak”.</p>

<p>Formulasi Perhitungan</p>	<p>: Rumus utama (berbasis deduplikasi NIK): Persentase populasi bebas = ((Jumlah penduduk domisili - Jumlah penduduk yang tercatat sebagai kasus ≥ 1 penyakit menular prioritas) / Jumlah penduduk domisili) $\times 100\%$</p> <p>Rumus kebalikan (opsional untuk pelaporan pendamping): Proporsi penduduk terdampak = (Jumlah penduduk yang tercatat sebagai kasus ≥ 1 penyakit / Jumlah penduduk domisili) $\times 100\%$ Persentase populasi bebas = $100\% - \text{Proporsi penduduk terdampak}$</p> <p>Kaidah data: Kasus valid: identitas jelas (NIK/ID unik), klasifikasi kasus sesuai definisi, tanggal pertama kali didiagnosis dalam tahun t (gunakan "first event" agar tidak ganda).</p> <p>Jika dedup lintas sistem belum penuh, laporkan catatan keterbatasan dan targetkan peningkatan proporsi kasus bernomor NIK sebagai indikator mutu.</p>
<p>Intepretasi</p>	<p>: Semakin tinggi persentase = semakin kecil proporsi penduduk yang terdampak penyakit menular prioritas.</p> <p>Angka cenderung mendekati 100%; karena itu, tampilkan juga kebalikannya (proporsi penduduk terdampak per 100.000) untuk sensitivitas tren.</p> <p>Disagregasi dianjurkan: kecamatan/kelurahan, jenis kelamin/kelompok umur, serta penyakit (TBC, HIV, DBD, dsb.) untuk penajaman intervensi.</p> <p>Perubahan nilai terpengaruh cakupan deteksi (testing/screening) dan kelengkapan pelaporan; selalu baca berdampingan dengan indikator ketepatan/kelengkapan data (mis. % kasus ber-NIK, % konfirmasi lab).</p>

Sumber Data	:	<p>Surveilans programatik (kasus per individu):</p> <p>SITB (TBC), SIHA (HIV), EWARS/SKDR & Sistem DBD (Dengue), SISMAL (Malaria), PD3I/Measles-Rubella case-based, pelaporan KLB (leptospirosis, hepatitis A/E, diare KLB, dll).</p> <p>Fasyankes: export kasus dari RS/klinik/puskesmas (SIRS/SIMPUS).</p> <p>Disdukcapil (SIAK): denominator penduduk by NIK/umur/jenis kelamin dan padanan domisili untuk dedup.</p> <p>Dokumen pendukung: BA rekonsiliasi bulanan/tri wulanan lintas sistem, daftar pembersihan duplikasi NIK, daftar kasus luar domisili.</p>
Frekuensi	:	<p>Bulanan/tri wulanan: monitoring operasional & rekonsiliasi (dedup NIK, kelengkapan variabel kunci, cakupan deteksi).</p> <p>Tahunan: konsolidasi angka utama Renstra (tetapkan cut-off yang konsisten; mis. 31 Des tiap tahun).</p>
Tipe Indikator	:	Positif

g	Sasaran	: Meningkatkan layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	: Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar
	Satuan	: %
	Definisi Operasional	<p>: Proporsi fasilitas kesehatan binaan Dinas Kesehatan Kota Semarang (mis. Puskesmas/jejaring, Klinik, RS, Lab, dan PNF kefarmasian sesuai cakupan yang ditetapkan daerah) yang memenuhi standar minimum pada tahun berjalan. Yang dimaksud “sesuai standar” adalah fasyankes yang seluruh kriteria minimal berikut terpenuhi (checklist kepatuhan—disesuaikan SOP daerah dan regulasi Kemenkes):</p> <p>Legalitas aktif: izin operasional sah/masih berlaku; status satuan aktif (bukan nonaktif/merger).</p> <p>Akreditasi berlaku dari lembaga akreditasi yang diakui Kemenkes (untuk jenis fasilitas yang wajib akreditasi).</p> <p>SDM kunci terpenuhi: jumlah & kualifikasi minimal sesuai jenis fasyankes (dokter/bidan/perawat/tenaga kefarmasian/dll.) beserta STR/SIP yang masih berlaku.</p> <p>Sarpras inti tersedia & laik: ruang/alat/IPP (air bersih, sanitasi), PPI & K3 berjalan (SOP, log, APD).</p> <p>Layanan wajib sesuai jenis fasyankes tersedia (jam layanan, paket layanan UKM/UKP) dan SOP terdokumentasi.</p> <p>Kepatuhan pelaporan ke sistem wajib (SIKDA/ASIK/SIRS, SISRUITE/SIRANAP sesuai jenis, surveilans penyakit, e-PPGBM, dsb.) ≥ ambang (mis. ≥90% ketepatan & ketepatan waktu 3 bulan terakhir).</p>
	Formulasi Perhitungan	<p>: Rumus dasar (status biner per fasilitas): Persentase = (Jumlah fasyankes yang memenuhi seluruh kriteria standar / Jumlah seluruh fasyankes sasaran) × 100%</p> <p>Aturan penilaian (biner): Status_fasyankes = 1 jika semua kriteria 1–6 terpenuhi; 0 jika salah satu tidak terpenuhi.</p> <p>Opsi skoring berbobot (bila diperlukan daerah): Skor_fasyankes = (Legalitas 25%) + (Akreditasi 25%) + (SDM 20%) + (Sarpras 15%) + (Pelaporan 10%) + (Mutu/PPI-K3 5%) Persentase = (Σ Skor_fasyankes / Jumlah fasyankes) × 100%</p> <p>Ambang “sesuai standar” dapat ditetapkan, mis. Skor ≥ 80 → dihitung sebagai memenuhi.</p>

Intepretasi	<p>: Semakin tinggi persentase → semakin banyak fasyankes yang laik standar minimal.</p> <p>Disarankan tampilkan disagregasi menurut jenis fasilitas (Puskesmas, Klinik, RS, dst.) agar pembinaan tepat sasaran.</p> <p>Usulan kategorisasi (silakan sesuaikan baseline kota/target Renstra): ≥ 95% : Sangat Baik 80–94% : Baik 60–79% : Cukup < 60% : Kurang</p> <p>Catatan interpretasi: perubahan denominator (fasyankes baru/ditutup) harus dicatat; lakukan rekonsiliasi lis master tiap triwulan.</p>
Sumber Data	<p>: Perizinan: PMPTSP/OSS-RBA (izin operasional & status aktif).</p> <p>Akreditasi: status & masa berlaku dari lembaga akreditasi yang diakui Kemenkes (RS/Klinik/Puskesmas/Lab sesuai ketentuan).</p> <p>SDM: SIA SDM/SIM SDM (STR/SIP), daftar penugasan fasyankes, jadwal layanan.</p> <p>Sarpras & mutu: hasil self-assessment/form audit Dinkes, log PPI & K3, daftar peralatan pokok, berita acara pemeriksaan.</p> <p>Pelaporan: SIKDA/ASIK/SIRS, SISRUITE/SIRANAP (jika wajib), aplikasi surveilans program (TB, HIV, DBD, PD3I, e-PPGBM, dll.) termasuk laporan ketepatan & ketepatan waktu.</p> <p>Dokumen pendukung: SK penetapan ambang standar, SOP verifikasi, berita acara rekonsiliasi data dan pembersihan duplikasi.</p>
Frekuensi	<p>: Triwulanan: monitoring operasional & verifikasi lapangan/dokumen (legalitas, akreditasi, SDM, pelaporan).</p> <p>Tahunan: rekap angka utama Renstra (cut-off konsisten, mis. 31 Desember), plus lampiran disagregasi per jenis fasyankes.</p>
Tipe Indikator	: Positif

h	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	:	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Proporsi penduduk ber-NIK dan berdomisili di Kota Semarang pada periode pelaporan yang terdaftar sebagai peserta JKN (BPJS Kesehatan) — dapat dilaporkan dalam dua cara:</p> <p>Cakupan Terdaftar: penduduk yang memiliki status kepesertaan JKN (PBI APBN/APBD, PPU, PBPU, BP) tanpa melihat status aktif iuran.</p> <p>Cakupan Aktif (disarankan sebagai angka utama): penduduk yang berstatus aktif pada sistem BPJS Kesehatan (tidak menunggak/suspend) pada tanggal cut-off.</p>
Formulasi Perhitungan	:	<p>Rumus A – Cakupan Terdaftar Persentase = $(\text{Jumlah penduduk domisili yang terdaftar JKN} / \text{Jumlah penduduk domisili}) \times 100\%$</p> <p>Rumus B – Cakupan Aktif (disarankan) Persentase = $(\text{Jumlah penduduk domisili yang berstatus aktif JKN} / \text{Jumlah penduduk domisili}) \times 100\%$</p> <p>Kaidah data (pembilang/penyebut): Pembilang: hasil padanan NIK antara master penduduk (Disdukcapil) dan database kepesertaan BPJS Kesehatan pada tanggal cut-off. Untuk Rumus B, filter status = aktif. Lakukan deduplikasi per NIK dan keluarkan meninggal/pindah keluar sebelum cut-off. Penyebut: jumlah penduduk domisili Kota Semarang (Disdukcapil, by NIK). Jika memakai proyeksi BPS sebagai alternatif, gunakan konsisten sepanjang seri Renstra (hindari gonta-ganti sumber). Disagregasi dianjurkan: kecamatan/kelurahan, kelompok umur (0–4, 5–14, 15–59, 60+), jenis kelamin, segmen JKN (PBI APBN/APBD, PPU, PBPU, BP).</p>	
Intepretasi	:	<p>Nilai lebih tinggi = cakupan perlindungan kesehatan masyarakat lebih baik.</p> <p>Rujukan kebijakan: $\geq 95\%$ lazim dipakai sebagai ambang UHC (Universal Health Coverage) di level daerah.</p> <p>Baca bersama indikator mutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi peserta aktif (aktif/terdaftar), • Rasio bayi baru lahir terdaftar ≤ 28 hari, • Persistensi aktif (retensi kepesertaan triwulanan). <p>Perubahan besar bisa dipengaruhi pembersihan data (kematian/migrasi) dan penetapan PBI APBD tahunan.</p>	

Sumber Data	:	<p>BPJS Kesehatan: extract kepesertaan per NIK (status aktif/non-aktif, segmen) pada tanggal cut-off; rekap per wilayah.</p> <p>Disdukcapil (SIAK): master penduduk domisili by NIK (termasuk status hidup/pindah).</p> <p>Dinas Sosial: daftar PBI APBD yang ditetapkan; perubahan tahunan.</p> <p>(Opsional) BPS: proyeksi penduduk (bila dipakai konsisten sebagai denominator analitik).</p> <p>Dokumen pendukung: berita acara rekonsiliasi dan deduplikasi BPJS–Disdukcapil (daftar ganda, meninggal, pindah).</p>
Frekuensi	:	<p>Triwulanan: monitoring operasional (aktivasi, retensi aktif, pembersihan NIK).</p> <p>Tahunan: angka utama Renstra (cut-off mis. 31 Desember; tetapkan dan gunakan konsisten)</p>
Tipe Indikator	:	Positif

i	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	:	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Jumlah tenaga yang aktif bertugas di wilayah Kota Semarang pada tahun berjalan per 100.000 penduduk Kota Semarang. Diukur sebagai:</p> <p>Rasio Tenaga Medis: dokter (umum & spesialis) + dokter gigi (umum & spesialis).</p> <p>Rasio Tenaga Kesehatan (non-medis): perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, nutrisisionis/gizi, sanitarian, tenaga kesehatan masyarakat, ATLM, radiografer, fisioterapis, perekam medis & infokes, dan jabatan kesehatan lain sesuai klasifikasi SDM.</p> <p>Rasio Total (opsional): gabungan medis + non-medis.</p> <p>Catatan operasional: Aktif = memiliki penugasan/kontrak pada fasilitas di Semarang (Puskesmas/jejaring, RS, klinik, apotek, lab, dll.) pada tanggal cut-off.</p> <p>Gunakan FTE (Full-Time Equivalent) bila ada praktik paruh waktu/multi-situs; jika belum, gunakan headcount dengan deduplikasi NIK/SIP agar tidak ganda.</p>

<p>Formulasi Perhitungan</p>	<p>: Rumus 1 – Rasio Tenaga Medis Rasio medis per 100.000 = (Jumlah Tenaga Medis aktif (FTE) / Jumlah penduduk) × 100.000 Rumus 2 – Rasio Tenaga Kesehatan (non-medis) Rasio nakes per 100.000 = (Jumlah Tenaga Kesehatan non-medis aktif (FTE) / Jumlah penduduk) × 100.000 Rumus 3 – Rasio Total (opsional) Rasio total per 100.000 = ((Tenaga Medis aktif (FTE) + Tenaga Kesehatan non-medis aktif (FTE)) / Jumlah penduduk) × 100.000 Kaidah data : Pembilang: jumlah tenaga aktif per kategori (medis / non-medis), status penugasan di fasilitas Semarang pada tanggal cut-off (FTE dianjurkan). Lakukan deduplikasi per NIK/SIP/STR; keluarkan yang pindah/berhenti sebelum cut-off. Penyebut: jumlah penduduk berdomisili Kota Semarang (Disdukcapil) pada tanggal cut-off (atau rata-rata tengah tahun). Disagregasi dianjurkan: jenis tenaga (dokter, perawat, bidan, dst.), jenis fasilitas (Puskesmas/RS/klinik), wilayah (kecamatan/kelurahan), serta PNS/PPPK/Non-ASN.</p>
<p>Intepretasi</p>	<p>: Semakin besar rasio → ketersediaan SDM kesehatan per penduduk lebih baik. Baca per kategori tenaga (dokter, bidan, perawat, dsb.) agar kebijakan penempatan & rekrutmen tepat sasaran. Perubahan dapat dipengaruhi pergeseran denominator (pertumbuhan/rekonsiliasi penduduk) dan mutasi SDM (masuk/keluar daerah). Contoh pembacaan (sesuaikan baseline & target kota): Dokter per 100.000 naik → akses layanan kuratif/rujukan membaik. Bidan/perawat per 100.000 tinggi di wilayah tertentu → perkuat pemanfaatan di KIA/UKM esensial, evaluasi distribusi.</p>

Sumber Data	:	<p>SIA SDM/SIM SDM Kesehatan (Dinkes): master SDM per NIK/STR/SIP, unit kerja, status aktif.</p> <p>Fasyankes: Puskesmas/SIMPUS, RS (SIRS/RS Online), klinik, apotek, laboratorium—daftar pegawai & penugasan (FTE/jam kerja).</p> <p>Perizinan profesi: register STR/SIP (kedaluwarsa/aktif) untuk verifikasi.</p> <p>Disdukcapil (SIK): denominator penduduk by usia/jenis kelamin & padanan NIK.</p> <p>Dokumen pendukung: BA rekonsiliasi triwulanan (dedup multi-situs), daftar masuk/keluar SDM, keputusan penempatan.</p>
Frekuensi	:	<p>Triwulanan: monitoring operasional & rekonsiliasi (mutasi SDM, masa berlaku STR/SIP, FTE).</p> <p>Tahunan: angka utama Renstra (cut-off konsisten, mis. 31 Desember), dengan lampiran disagregasi per kategori tenaga & wilayah.</p>
Tipe Indikator	:	Positif

j	Sasaran	:	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Proporsi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) binaan Kota Semarang yang pada tahun berjalan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan IRTP. Suatu IRTP dinilai memenuhi (MS) bila seluruh kriteria minimal di bawah ini terpenuhi pada siklus verifikasi terakhir:</p> <p>Legalitas aktif: memiliki NIB dan SPP-IRT yang sah & masih berlaku untuk jenis produk yang diproduksi. SDM kunci: penanggung jawab/penjamah pangan lulus PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) & tersedia bukti. Sarana & proses: hasil inspeksi CPPOB IRTP/higienitasanitasi memenuhi ambang (semua titik kritis “ya”/nilai \geq ambang SOP).</p> <p>Produk: bila dilakukan sampling tahun berjalan, hasil uji (mikrobiologi/fisika/kimia sesuai standar produk) memenuhi syarat. Label: kesesuaian label pangan olahan (nama/komposisi/berat bersih/ED/kode produksi/nomor PIRT/informasi lain yang dipersyaratkan).</p>

Formulasi Perhitungan	:	<p>Rumus utama (berbasis IRTP): $\text{Persentase} = (\text{Jumlah IRTP aktif yang memenuhi seluruh kriteria keamanan \& mutu} / \text{Jumlah seluruh IRTP aktif binaan}) \times 100\%$</p> <p>Opsi alternatif (bila daerah memakai basis produk yang diperiksa): $\text{Persentase} = (\text{Jumlah produk/sampel IRTP yang memenuhi syarat (MS)} / \text{Jumlah produk/sampel IRTP yang diperiksa}) \times 100\%$</p> <p>Kaidah data: IRTP aktif = memproduksi pada tahun berjalan (bukan tutup/nonaktif/pindah). Lakukan deduplikasi per NIB/nomor PIRT; keluarkan yang izin kedaluwarsa sebelum cut-off. Pilih satu basis (IRTP atau produk) dan gunakan konsisten sepanjang seri Renstra.</p>
Intepretasi	:	<p>Nilai lebih tinggi = semakin banyak IRTP yang telah patuh dan produk yang aman & bermutu. Usulan kategori (sesuaikan baseline daerah): $\geq 95\%$: Sangat Baik 80–94% : Baik 60–79% : Cukup $< 60\%$: Kurang Disarankan tampilkan juga disagregasi per kecamatan, kategori produk (kering/basah/siap saji), dan status risiko untuk penajaman pembinaan.</p>
Sumber Data	:	<p>Dinas Kesehatan: daftar IRTP binaan/aktif, hasil inspeksi CPPOB/higiene-sanitasi, berita acara pembinaan & verifikasi, daftar lulusan PKP.</p> <p>UPTD Labkes/Balai Lab/BPOM (bila rujuk): hasil uji laboratorium produk (mikrobiologi/kimia/fisika) & resume kesesuaian.</p> <p>DPMPSTSP/OSS-RBA: data NIB/SPP-IRT (baru/perubahan/perpanjangan) & status izin.</p> <p>Pengawasan pasar/pengaduan (bila ada): hasil penertiban/penarikan, untuk umpan balik pembinaan.</p>
Frekuensi	:	<p>Triwulanan: monitoring operasional (izin, PKP, inspeksi, uji sampel) dan pembaruan status IRTP.</p> <p>Tahunan: rekap angka utama Renstra (cut-off mis. 31 Desember) dengan lampiran disagregasi & daftar IRTP tidak memenuhi untuk rencana pembinaan tahun berikutnya.</p>
Tipe Indikator	:	Positif

k	Sasaran	:	Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran dan pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan aktivitas fisik
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan tertulis dan masih berlaku untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat. "Kebijakan" yang dimaksud adalah dokumen resmi kelurahan (mis. SK Lurah/Peraturan/Surat Edaran/Keputusan Forum Kelurahan) sekurang-kurangnya memuat: (1) tujuan peningkatan aktivitas fisik; (2) bentuk intervensi/kegiatan (contoh: senam rutin, Car Free Day tingkat kelurahan, gerakan jalan kaki/bersepeda, pemanfaatan RTH, POSBINDU aktif, olahraga remaja); (3) dukungan sarana/prasarana atau penataan ruang ramah aktivitas fisik; (4) penanggung jawab & kemitraan (PKK, karang taruna, puskesmas, sekolah, RW/RT, dunia usaha); (5) pembiayaan; (6) mekanisme pemantauan minimal 1x/tahun. Kebijakan dihitung jika ditetapkan pada atau sebelum tahun berjalan dan masih aktif.
	Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah kelurahan dengan kebijakan yang memenuhi kriteria / Jumlah seluruh kelurahan) × 100%. Pembilang: Banyaknya kelurahan dengan kebijakan tertulis yang memenuhi kriteria minimal pada tahun berjalan. Penyebut: Jumlah kelurahan di Kota Semarang pada tahun berjalan (mengacu data administrasi resmi).
	Intepretasi	:	Semakin tinggi persentase, semakin luas cakupan tatakelola kelurahan yang mendukung perilaku aktif bergerak (selaras GERMAS). Nilai ≥ target tahunan menunjukkan penguatan kebijakan tingkat komunitas. Catatan: Indikator ini mengukur keberadaan & mutu minimal kebijakan, bukan intensitas/hasil implementasinya; disarankan dipasangkan dengan indikator proses (jumlah kegiatan per bulan) atau hasil (proporsi warga aktif secara fisik). Disagregasi yang dianjurkan: per kecamatan, kelurahan lokus stunting/kemiskinan, binaan puskesmas.
	Sumber Data	:	(1) Kelurahan: salinan SK/SE/Perkel & lampiran rencana kegiatan; (2) Puskesmas pembina wilayah: daftar verifikasi lapangan & berita acara; (3) Dinas Kesehatan (Promkes/Kesmas/GERMAS): rekap kota; (4) Bappeda/Bagian Pemerintahan: referensi jumlah kelurahan & validasi dokumen; (opsional pendukung: dokumentasi kegiatan, foto papan pengumuman kebijakan, notulen musyawarah kelurahan).
Frekuensi	:	Monitoring triwulanan (update perubahan status kebijakan di kelurahan) dan pelaporan tahunan untuk evaluasi Renstra.	
Tipe Indikator	:	Positif	

1	Sasaran	:	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro
	Indikator Kinerja Utama	:	Net death rate (NDR) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
	Satuan	:	Permil
	Definisi Operasional	:	NDR adalah angka kematian pasien rawat inap yang meninggal ≥ 48 jam setelah masuk rumah sakit per 1.000 pasien keluar (keluar hidup + keluar meninggal) pada periode pelaporan. Termasuk kematian bayi baru lahir bila terjadi pada usia ≥ 48 jam perawatan. Tidak termasuk DOA (dead on arrival), kematian di IGD/rawat jalan, lahir mati (stillbirth), serta kematian < 48 jam (untuk NDR dihitung di GDR)
	Formulasi Perhitungan	:	$\text{NDR (\%)} = \frac{\text{Jumlah pasien rawat inap meninggal } \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)}} \times 1.000.$ Pembilang: pasien rawat inap yang meninggal ≥ 48 jam setelah masuk pada periode pelaporan. Penyebut: seluruh pasien keluar (hidup + meninggal) pada periode pelaporan
Intepretasi	:	Semakin rendah NDR \rightarrow mutu layanan rawat inap semakin baik, karena kematian yang terjadi setelah rumah sakit memiliki waktu memberikan asuhan. NDR sensitif terhadap case-mix (derajat keparahan), pola rujukan, kapasitas ICU, dan kepatuhan tata laksana klinis; karena itu dianjurkan dianalisis per unit (ICU, interna, bedah, kebidanan, dsb.) dan dibandingkan dengan tren historis rumah sakit maupun rumah sakit sekelas. Rujukan historis di Indonesia sering menggunakan ambang kinerja $\leq 25\%$ sebagai capaian yang baik, namun target Renstra sebaiknya ditetapkan berbasis baseline RSUD dan benchmarking regional.	
	Sumber Data	:	1) Sensus Harian Rawat Inap (SHRI)/rekap sensus bangsal; 2) Rekam Medis (status kematian & waktu masuk/meninggal untuk verifikasi ≥ 48 jam); 3) SIMRS/dashboard mutu RS; 4) Pelaporan SIRS Kemenkes – Form RL 1.2 (Indikator Pelayanan: BOR, LOS, BTO, TOI, NDR, GDR) dan formulir RL lainnya terkait; 5) Laporan mutu/komite medis RSUD.
	Frekuensi	:	Rekap internal bulanan (untuk pemantauan mutu), triwulanan/semesteran (review manajemen), dan tahunan untuk konsolidasi & pelaporan RL/SIRS. Sardjito
	Tipe Indikator	:	Negatif

m	Sasaran	:	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
	Indikator Kinerja Utama	:	Net death rate (NDR) RSUD Mijen
	Satuan	:	Permil
	Definisi Operasional	:	NDR adalah angka kematian pasien rawat inap yang meninggal ≥ 48 jam setelah masuk rumah sakit per 1.000 pasien keluar (keluar hidup + keluar meninggal) pada periode pelaporan. Termasuk kematian bayi baru lahir bila terjadi pada usia perawatan ≥ 48 jam. Tidak termasuk: DOA (dead on arrival), kematian di IGD/rawat jalan, lahir mati (stillbirth), dan kematian < 48 jam (yang dihitung dalam GDR).
	Formulasi Perhitungan	:	$\text{NDR (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap meninggal } \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)}} \right) * 1.000.$ Pembilang: jumlah pasien rawat inap yang meninggal ≥ 48 jam setelah masuk RSUD Mijen pada periode pelaporan. Penyebut: jumlah pasien keluar pada periode yang sama (pulang/rujuk/APS/meninggal). Catatan: "Keluar" tidak termasuk perpindahan antar-ruang/antar-kelas di dalam rumah sakit.
	Intepretasi	:	Semakin rendah NDR \rightarrow semakin baik mutu layanan rawat inap, karena mencerminkan pencegahan kematian setelah tersedia waktu untuk asuhan. NDR dipengaruhi case-mix/derajat keparahan, pola rujukan, kapasitas ICU, kepatuhan tata laksana klinis, dan ketersediaan SDM/alat. Untuk evaluasi bermakna, bandingkan tren historis RSUD Mijen, lakukan disagregasi per unit/SMF (ICU, penyakit dalam, bedah, obgyn, anak), dan lengkapi dengan indikator pendamping (mis. GDR, mortalitas unit berisiko). Sebagai rujukan praktis, banyak RS menggunakan capaian $\leq 25\%$ sebagai kinerja baik, namun target Renstra sebaiknya ditetapkan berbasis baseline RSUD Mijen dan benchmarking regional/tipe RS.
	Sumber Data	:	1) Sensus Harian Rawat Inap (SHRI)/rekap bangsal; 2) Rekam medis (tanggal/jam masuk & meninggal untuk verifikasi cut-off 48 jam); 3) SIMRS/dashboard mutu; 4) Pelaporan SIRS/RL Indikator Pelayanan RS (yang memuat NDR dan GDR); 5) Laporan Komite Mutu/Komite Medik (audit mortalitas).
	Frekuensi	:	Rekap internal bulanan (pemantauan mutu), review triwulanan/semesteran (manajemen), dan pelaporan tahunan (konsolidasi & pelaporan SIRS/RL).
Tipe Indikator	:	Negatif	

3	Perangkat Daerah	:	Dinas Pekerjaan Umum
a	Tujuan	:	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga.
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase genangan, banjir, dan rob
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Proporsi luas kawasan terbangun yang mengalami genangan/banjir/rob sedikitnya 1 kali dalam periode pelaporan terhadap total luas kawasan terbangun yang menjadi wilayah layanan Dinas PU.</p> <p>Klasifikasi kejadian ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:</p> <p>(a) Genangan: Kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase atau faktor manusia yang mengganggu aktivitas masyarakat. Durasi: Singkat (< 24 jam). Ketinggian air: < 40 cm. Luasan: Terkonsentrasi di satu bagian (Radius < 100 m).</p> <p>(b) Banjir: Peristiwa terendamnya suatu daerah/daratan karena volume air yang meningkat (dominasi faktor alam dan manusia). Durasi: Lama (> 24 jam). Ketinggian air: > 40 cm. Luasan: Mencakup area yang luas (Radius > 100 m).</p> <p>(c) Rob: Banjir yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut (pasang) hingga menggenangi daratan.</p> <p>Catatan: Area yang terkena lebih dari satu jenis kejadian pada periode yang sama dihitung sekali (union area).</p>
Formulasi Perhitungan	:	<p>Persentase genangan/banjir/rob (gabungan) =</p> $\frac{\text{Luas unik area terdampak (genangan } \cup \text{ banjir } \cup \text{ rob) dlm 1 thn}}{\text{Total luas kawasan terbangun wilayah layanan}} \times 100\%$	
Intepretasi	:	<p>Nilai lebih kecil = lebih baik, menunjukkan berkurangnya area terdampak dan meningkatnya kinerja pengendalian banjir/rob dan drainase.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat di-breakdown per kecamatan/kelurahan dan per jenis kejadian untuk pengambilan keputusan programatik (normalisasi sungai, peninggian tanggul, pompa, drainase lingkungan, peninggian jalan, sea wall, dsb.). - Target tahunan umumnya berupa penurunan persentase dibanding baseline awal Renstra. 	

Sumber Data	:	Dinas PU: peta jaringan drainase, catatan titik genangan, hasil patroli/survei, laporan pekerjaan dan operasi pompa/tanggul. - BPBD: kejadian banjir/rob harian, incident log, peta terdampak. - BMKG / Pusdalops: curah hujan harian, peringatan dini, data pasang surut. - Citra penginderaan jauh (bila tersedia): Sentinel/Landsat/Planet untuk water extent; peta genangan berbasis crowdsourcing (lapor warga/aplikasi 112). - Pemkot/kelurahan: rekap laporan masyarakat, foto ber-geotag.
Frekuensi	:	Pengukuran: pemuakhiran triwulanan (kompilasi kejadian), konsolidasi tahunan untuk angka Renstra. Pelaporan: tahunan pada Laporan Kinerja/IKU OPD; triwulanan untuk rapat evaluasi program.
Tipe Indikator	:	Negatif

b	Tujuan	:	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga.
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Perbandingan antara realisasi volume fisik pekerjaan kebinamargaan yang selesai dikerjakan (terbangun/terangani) terhadap target fisik yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun berjalan. Lingkup "infrastruktur terbangun" meliputi realisasi fisik pada: Pembangunan Jalan Baru: Pembukaan akses jalan yang sebelumnya belum ada. Peningkatan/Preservasi Jalan: Pekerjaan struktur/lapis permukaan untuk mempertahankan atau meningkatkan jalan menuju kondisi mantap. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan: Pekerjaan struktur jembatan untuk mempertahankan atau meningkatkan jembatan menuju kondisi baik. Prasarana Pendukung: Termasuk drainase jalan, trotoar, dan talud/dinding penahan tanah yang menjadi satu kesatuan paket pekerjaan.
Formulasi Perhitungan	:	Persentase Capaian = $\frac{\sum \text{Realisasi volume baku per subkomponen}}{\sum \text{Target volume baku per subkomponen}} \times 100\%$ Jika subkomponen sangat beragam, gunakan bobot RAB : $\frac{\sum (\text{Realisasi biaya terverifikasi})}{\sum (\frac{\text{Pagu}}{\text{Target}} \text{biaya fisik})} \times 100\%$	

		<p>Objek capaian: pekerjaan fisik yang selesai & terverifikasi (BAST/PHO atau MC \geq 95% sesuai SOP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan: hanya paket yang direncanakan sebagai target tahun berjalan (Renja/ADK/APBD). - Kumulasi: jika indikator ditetapkan kumulatif Renstra, agregasikan capaian tahunan terhadap target kumulatif. - Batas atas: angka kinerja dibatasi 100% untuk pelaporan, meski realisasi >100%.
Intepretasi	:	<p>Lebih besar = lebih baik. Mencerminkan akurasi perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta efektivitas belanja modal kebinamargaan. Dapat di-breakdown per subkomponen (jalan/jembatan/dll), per kecamatan, dan per sumber dana (DAU/DAK/BKK).</p>
Sumber Data	:	<p>Bidang Bina Marga/UPT: DPA/RKA, kontrak & addendum, laporan progres, MC, BAST/PHO/FHO, as-built drawing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPK/Pejabat Pelaksana: monthly report fisik-keuangan. - Bappeda/Inspektorat/BPKAD: e-Monev, SIMRAL/SIMDA, realisasi keuangan (verifikasi silang). - SIRUP/LPSE: status paket. - GIS/JD/Asset Register: panjang/jumlah eksisting untuk validasi.
Frekuensi	:	<p>Pemutakhiran: bulanan (internal). Rekap evaluasi: triwulanan. Pelaporan kinerja: tahunan (LKjIP/IKU OPD).</p>
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase genangan air
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Proporsi luas kawasan terbangun yang mengalami genangan air permukaan (akibat antrean air/drainase) sedikitnya 1 kali dalam periode pelaporan terhadap total luas kawasan terbangun wilayah layanan Dinas PU.</p> <p>Kriteria Genangan ditetapkan sebagai berikut: Penyebab: Air permukaan yang tidak dapat mengalir akibat tidak berfungsinya sistem drainase atau faktor manusia (bukan akibat luapan badan air/sungai atau pasang laut/rob). Durasi: Terjadi dalam waktu relatif singkat (< 24 jam). Ketinggian: Ketinggian air < 40 cm. Luasan: Terkonsentrasi di satu bagian saja (Radius area < 100 m).</p> <p>Catatan: Jika satu lokasi tergenang berulang kali dalam setahun, tetap dihitung sebagai satu luasan unik (union area).</p>
	Formulasi Perhitungan	:	<p>Persentase Genangan Air =</p> $\frac{\text{Luas unik area tergenang (per tahun)}}{\text{Total luas kawasan terbangun}} \times 100\%$
	Intepretasi	:	<p>Nilai lebih kecil = lebih baik, menunjukkan berkurangnya area terdampak genangan dan meningkatnya kinerja drainase lingkungan. Dapat di-breakdown per kecamatan/kelurahan untuk penentuan prioritas (normalisasi saluran, perbaikan kemiringan, sumur resapan, kolam retensi, pompa, dll.). Target Renstra umumnya berupa penurunan persentase dibanding baseline.</p>
	Sumber Data	:	<p>Dinas PU: peta jaringan drainase, catatan titik genangan, log operasi/pemeliharaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPBD/Pusdalops: log kejadian hujan lebat & genangan. - BMKG: data hujan harian/menit. - Citra penginderaan jauh (bila tersedia) untuk water extent. - Laporan masyarakat/kelurahan (aplikasi pengaduan, 112) dengan lokasi & waktu.
	Frekuensi	:	<p>Pengukuran: kompilasi triwulanan, konsolidasi tahunan untuk angka kinerja.</p> <p>Pelaporan: tahunan pada Laporan Kinerja/IKU OPD; triwulanan untuk evaluasi program.</p>
Tipe Indikator	:	Positif	

d	Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase kawasan banjir
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Proporsi luas kawasan terbangun yang terdampak banjir (luapan badan air: sungai/kanal/retarding basin) sedikitnya 1 kali dalam periode pelaporan terhadap total luas kawasan terbangun wilayah layanan Dinas PU.</p> <p>Kriteria Banjir dibedakan dari genangan dan rob sebagai berikut: Penyebab: Peristiwa terendamnya daratan karena peningkatan volume air yang didominasi faktor alam atau kombinasi kompleks (bukan sekadar antrean drainase). Durasi: Terjadi dalam waktu yang lama (> 24 jam). Ketinggian: Ketinggian air > 40 cm. Luasan: Mencakup area yang luas (Radius area > 100 m).</p> <p>Catatan: Lokasi yang terdampak berulang kali dalam setahun dihitung sebagai satu luasan unik (union area).</p>
	Formulasi Perhitungan	:	<p>Persentase Kawasan Banjir =</p> $\frac{\text{Luas unik area terdampak banjir (per tahun)}}{\text{Total luas kawasan terbangun}} \times 100\%$
Intepretasi	:	<p>Nilai lebih kecil = lebih baik (mengindikasikan berkurangnya luas kawasan yang terkena banjir dan meningkatnya kinerja pengendalian banjir). Dapat diurai per kecamatan/kelurahan untuk prioritas program: normalisasi sungai/kanal, pelebaran/pengerukan, tanggul/sea dike, kolam retensi, pump station, floodway, SUDS/blue-green infrastructure, dan manajemen DAS hulu. Target Renstra umumnya berupa penurunan persentase dari baseline.</p>	
Sumber Data	:	<p>Dinas PU: peta jaringan sungai/kanal, dokumentasi pekerjaan, catatan operasi pompa/tanggul, hasil survei lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPBD/Pusdalops: log kejadian banjir, peta terdampak per peristiwa. - BBWS/BWS (jika relevan): data hidrologi/hidraulik sungai utama. - BMKG: curah hujan harian/menitan & peringatan dini ekstrem. - Citra penginderaan jauh (Sentinel/Landsat/Planet) untuk flood extent, serta laporan masyarakat/kelurahan (112/aplikasi pengaduan) ber-geolokasi. 	

Frekuensi	:	Pengukuran: kompilasi triwulanan, konsolidasi tahunan sebagai angka kinerja. Pelaporan: tahunan (LKjIP/IKU OPD) dan triwulanan untuk evaluasi program.
Tipe Indikator	:	Negatif

e	Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase kawasan rob
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi luas kawasan terbangun yang mengalami limpasan air laut (rob) sedikitnya 1 kali dalam periode pelaporan terhadap total luas kawasan terbangun wilayah layanan Dinas PU. Kriteria Banjir Rob ditetapkan sebagai berikut: Definisi: Banjir yang airnya berasal dari air laut. Penyebab: Diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut (pasang) hingga air tersebut menggenangi daratan. Karakteristik Utama: Murni berasal dari pengaruh air laut (dibedakan dari genangan akibat antrean drainase atau banjir luapan sungai tawar). Catatan: Lokasi yang terdampak rob berulang kali dalam setahun dihitung sebagai satu luasan unik (union area).
	Formulasi Perhitungan	:	Persentase kawasan rob = $\frac{\text{Luas unik area terdampak rob (per tahun)}}{\text{Total luas kawasan terbangun}} \times 100\%$
Intepretasi	:	Dinas PU: peta polder/tanggul/pintu air/pompa, catatan operasi O&M, survei lapangan & titik rob. - BPBD/Pusdalops: log kejadian rob & peta terdampak. - BMKG Maritim: data pasang surut, gelombang, peringatan dini. - BIG/INSTANSI GEOSPASIAL: DEM, garis pantai, peta genangan; studi subsidensi (geodesi/PSDA/perguruan tinggi). - Citra penginderaan jauh (Sentinel/Landsat/Planet) & laporan masyarakat/kelurahan (112/aplikasi pengaduan) dengan lokasi & waktu.	

Sumber Data	:	Dinas PU: peta jaringan sungai/kanal, dokumentasi pekerjaan, catatan operasi pompa/tanggul, hasil survei lapangan. - BPBD/Pusdalops: log kejadian banjir, peta terdampak per peristiwa. - BBWS/BWS (jika relevan): data hidrologi/hidraulik sungai utama. - BMKG: curah hujan harian/menitan & peringatan dini ekstrem. - Citra penginderaan jauh (Sentinel/Landsat/Planet) untuk flood extent, serta laporan masyarakat/kelurahan (112/aplikasi pengaduan) ber-geolokasi.
Frekuensi	:	Pengukuran: kompilasi triwulanan, konsolidasi tahunan sebagai angka kinerja. Pelaporan: tahunan (LKjIP/IKU OPD); triwulanan untuk evaluasi program.
Tipe Indikator	:	Negatif

f	Sasaran	:	Meningkatnya konektivitas infrastruktur antar wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase jalan dalam kondisi mantap
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi panjang jalan kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kota. Kriteria pengukuran ditetapkan sebagai berikut: Definisi Jalan Mantap: Akumulasi panjang ruas jalan dengan kondisi Baik (B) dan kondisi Sedang (S). Kewenangan: Hanya mencakup ruas jalan yang ditetapkan dalam SK Status Jalan Kota sebagai kewenangan Kota Semarang (tidak menghitung jalan Nasional, Provinsi, atau jalan lingkungan/desa non-SK). Standar Penilaian: Kondisi dinilai berdasarkan survei kondisi jalan berkala (visual/RCS atau instrumen/IRI) sesuai standar teknis yang berlaku.

Formulasi Perhitungan	:	<p>Persentase Jalan Mantap =</p> $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik+sedang (km)}}{\text{Total panjang jalan kewenangan Pemkot (km)}} \times 100\%$ <p>Gunakan salah satu standar berikut (konsisten antar-tahun):</p> <p>a) IRI (m/km): Baik ≤ 4; Sedang $>4-8$; Rusak Ringan $>8-12$; Rusak Berat >12.</p> <p>b) PCI (0-100): Baik ≥ 85; Sedang $70-84$; Rusak Ringan $55-69$; Rusak Berat <55.</p> <p>c) IKJ/SDI Visual: kategori Baik/Sedang/Rusak R./Rusak B. sesuai SK teknis daerah.</p> <p>Satuan panjang: kilometer (km) centerline per ruas; agregasi per jaringan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numerator: akumulasi panjang ruas dengan status Baik atau Sedang. - Denominator: total panjang seluruh ruas jalan kewenangan Pemkot (termasuk yang belum tertangani). - Klasifikasi dilakukan pada level ruas (atau segmen homogen), kemudian ditotal.
Intepretasi	:	<p>Lebih besar = lebih baik. Mencerminkan kualitas layanan jaringan jalan dan efektivitas preservasi/pembangunan. Dapat diurai per kecamatan, fungsi jalan (arteri/kolektor/lokal), jenis permukaan (hotmix, rigid, dll.), serta sumber pendanaan (DAU/DAK/BKK). Target Renstra umumnya berupa kenaikan persentase mantap dari baseline.</p>
Sumber Data	:	<p>Bidang Bina Marga/UPT: hasil survei kondisi jalan (IRI/PCI/visual), inventarisasi ruas, SK status kewenangan, as-built, rekap panjang ruas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda/BPKAD: e-Monev fisik, realisasi pemeliharaan/preservasi (untuk verifikasi silang). - GIS/Asset Register: peta jaringan dan panjang resmi per ruas.
Frekuensi	:	<p>Pengukuran minimal tahunan (survei kondisi); pemutakhiran disarankan semesteran untuk kepentingan perencanaan. Pelaporan: tahunan pada LKjIP/IKU OPD; triwulanan untuk evaluasi internal program preservasi.</p>
Tipe Indikator	:	Positif

g	Sasaran	:	Meningkatnya konektivitas infrastruktur antar wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase jembatan dalam kondisi baik
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi panjang jembatan kewenangan Pemkot yang berada pada kondisi baik terhadap total panjang jembatan kewenangan Pemkot pada periode pelaporan. Kondisi baik mengacu pada hasil penilaian kondisi jembatan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan daerah (mis. IKJ/BCI/NKJ dalam Sistem Manajemen Jembatan), di mana kategori Baik berarti komponen utama (pondasi-bangunan bawah-bangunan atas-lantai**/**perletakan) berfungsi sesuai rencana, kerusakan minor, dan layak operasi tanpa pembatasan.
	Formulasi Perhitungan	:	<p>Persentase Jembatan Kondisi Baik =</p> $\frac{\text{Panjang jembatan kondisi baik (m)}}{\text{Total panjang jembatan kewenangan Pemkot (m)}} \times 100\%$ <p>Unit data: per jembatan (atau segmen bentang bila heterogen). Panjang menggunakan panjang efektif/bentang (m).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi kondisi: gunakan satu metode baku (IKJ/BCI/NKJ/visual) yang disahkan melalui SK Teknis. Contoh umum (sesuaikan SK): Baik, Sedang, Rusak Ringan, Rusak Berat. - Kewenangan: hanya jembatan kewenangan Kota Semarang (tidak termasuk nasional/provinsi/kabupaten/privat). - Agregasi: klasifikasi pada level jembatan/segmen → jumlahkan panjang kategori Baik untuk pembilang. - Perubahan jaringan: bila ada jembatan baru/alih kewenangan, perbarui denominator dan dokumentasikan tanggal efektif.
	Intepretasi	:	Lebih besar = lebih baik. Mencerminkan tingkat layanan dan keselamatan struktur serta efektivitas program pemeliharaan/preservasi dan rehabilitasi jembatan. Dapat di-breakdown per kecamatan, tipe struktur (gelagar beton/baja, box culvert, dll.), dan kelas jalan. Target Renstra umumnya berupa kenaikan terhadap baseline awal.
	Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Bina Marga/UPT: daftar jembatan (inventaris), hasil inspeksi berkala (form IKJ/BCI/NKJ/visual), BAST/PHO/FHO pekerjaan, as-built drawing. - GIS/Asset Register: koordinat, panjang, tipe struktur, tahun bangun/rehab. - Bappeda/BPKAD: e-Monev fisik & realisasi keuangan (verifikasi silang program preservasi/rehab).
Frekuensi	:	Inspeksi & pemutakhiran minimal tahunan; untuk jembatan strategis direkomendasikan semesteran. Pelaporan: tahunan pada LKjIP/IKU OPD; triwulanan untuk evaluasi internal.	
Tipe Indikator	:	Positif	

h	Sasaran	:	Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase jalan dan jembatan yang terbangun
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Tingkat capaian pembangunan/peningkatan/preservasi output fisik jalan dan jembatan pada tahun berjalan dibandingkan target tahunan yang tercantum dalam Renja/DPA (APBD/DAK). Jalan mencakup pembangunan/peningkatan/preservasi ruas; jembatan mencakup pembangunan/rehabilitasi/preservasi bentang. Capaian dihitung pada output fisik yang selesai & terverifikasi (BAST/PHO/FHO atau MC ≥ 95%) dan dijumlahkan dengan konversi satuan baku atau bobot biaya agar bisa digabung.
	Formulasi Perhitungan	:	<p>Opsi A : Berbasis Volume Baku , Persentase = $\frac{\text{Jumlah dari realisasi volume baku (jalan+jembatan)}}{\text{Jumlah dari target volume baku (jalan+jembatan)}} \times 100\%$</p> <p>Opsi B : Berbasis Bobot Biaya, Persentase = Jumlah dari realisasi biaya fisik terverifikasi (jalan + jembatan) / Jumlah dari Pagu/Target biaya fisik (jalan + jembatan) x 100%</p>
	Intepretasi	:	Lebih besar = lebih baik. Menggambarkan kinerja pelaksanaan program kebinamargaan pada tahun berjalan. Dapat diurai per jenis pekerjaan (jalan/jembatan), wilayah (kecamatan), dan sumber dana. Deviasi signifikan memberi sinyal isu lahan, utilitas, cuaca, material, atau proses pengadaan yang perlu ditindaklanjuti.
	Sumber Data	:	Bidang Bina Marga/UPT: DPA/RKA, kontrak & addendum, laporan progres, MC, BAST/PHO/FHO, as-built drawing. - Bappeda/BPKAD: e-Monev/SIMRAL/SIMDA (realisasi fisik-keuangan) untuk verifikasi silang. - LPSE/SIRUP: status paket (tender/non-tender). - GIS/Asset Register: panjang ruas & jembatan eksisting untuk validasi volume.
	Frekuensi	:	Pemutakhiran: bulanan (internal). Rekap evaluasi: triwulanan. Pelaporan kinerja: tahunan (LKjIP/IKU OPD).
	Tipe Indikator	:	Positif

4	Perangkat Daerah	:	Dinas Penataan Ruang
a	Tujuan	:	Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penatagunaruang yang berdayaguna dan berkelanjutan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Persentase bagian ruang/wilayah kota yang pemanfaatannya sudah sesuai dokumen rencana tata ruang (RTRW/RDTR) dan dikelola dengan prinsip berdayaguna (mendukung fungsi kawasan, kegiatan pemanfaatan ruang berjalan) serta berkelanjutan (memperhatikan daya dukung–daya tampung lingkungan, tidak melanggar ketentuan zonasi).</p> <p>Yang dihitung sebagai “berdayaguna dan berkelanjutan” adalah bidang/kawasan/pemanfaatan ruang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai peruntukan ruang dalam RTRW/RDTR/zona, 2. Memiliki izin/persetujuan/pencatatan pemanfaatan ruang (mis. KKPR, izin pemanfaatan ruang, rekomendasi tata ruang), 3. Tidak tercatat sebagai pelanggaran pemanfaatan ruang atau alih fungsi lahan yang dilarang.
	Formulasi Perhitungan	:	<p>Pembobotan dari Persentase bangunan yang berijin 35%; Persentase implementasi rencana tata ruang 30%; Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW 35%</p> <p>Keterangan:</p> <p>Pembilang: jumlah bidang/kawasan/pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW/RDTR/zona, dan berizin/tercatat, dan tidak melanggar ketentuan lingkungan/zonasi.</p> <p>Penyebut: seluruh pemanfaatan ruang/kawasan yang terdata dalam sistem penataan ruang/pengendalian pemanfaatan ruang Dinas Penataan Ruang pada tahun tersebut.</p>

Intepretasi	:	<p>Semakin tinggi persentase → semakin tertib pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dan semakin baik kualitas pengendalian pemanfaatan ruang (tata ruang lebih berdayaguna dan menjaga keberlanjutan).</p> <p>Jika persentase rendah → menunjukkan masih banyak pemanfaatan ruang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak sesuai peruntukan, 2. belum berizin/tercatat, 3. atau berpotensi menurunkan daya dukung–daya tampung lingkungan. <p>Dapat dijadikan indikator kinerja pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan pemanfaat ruang terhadap RTRW/RDTR.</p>
Sumber Data	:	<p>Dinas Penataan Ruang/Kimpraswil/PUPR Kota Semarang (bidang penataan/pengendalian pemanfaatan ruang):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. database pengendalian pemanfaatan ruang, 2. data penerbitan rekomendasi tata ruang/KKPR, 3. laporan penertiban/pelanggaran tata ruang. <p>Dokumen RTRW/RDTR Kota Semarang (sebagai acuan kesesuaian).</p> <p>Bisa dilengkapi dengan data hasil monitoring lapangan/SIPR bila sudah ada sistem informasi penataan ruang.</p>
Frekuensi	:	Tahunan (setiap akhir tahun anggaran).
Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase bangunan yang berijin
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Persentase jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dibandingkan dengan total bangunan yang berdiri dan terdata dalam wilayah Kota Semarang pada tahun berjalan.</p> <p>Yang dimaksud bangunan berizin adalah bangunan yang telah memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atau sebelumnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah bangunan ber-PBG/Jumlah bangunan se-Kota Semarang (SP bangunan tanpa PBG)

	Intepretasi	:	<p>Nilai persentase semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perizinan bangunan dan meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>Nilai rendah menunjukkan masih banyak bangunan berdiri tanpa izin, sehingga berpotensi menimbulkan masalah tata ruang, keselamatan, dan penataan kota.</p>
	Sumber Data	:	<p>Dinas Penataan Ruang / Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Database penerbitan PBG/IMB 2. Data hasil pendataan bangunan (SIPR, survey lapangan, atau data Dinas terkait) 3. Laporan pengawasan bangunan dan penegakan peraturan bangunan
	Frekuensi	:	Tahunan (setiap akhir tahun anggaran)
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Implementasi Rencana Tata Ruang
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>Persentase bagian wilayah Kota Semarang yang pemanfaatan ruangnya telah sesuai dengan arahan dan ketentuan rencana tata ruang (RTRW/RDTR) dibandingkan dengan total wilayah yang terpantau pemanfaatan ruangnya pada tahun berjalan.</p> <p>Yang dimaksud implementasi rencana tata ruang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berjalan dan sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang, pola ruang, dan struktur ruang sebagaimana diatur dalam dokumen RTRW atau RDTR.</p>
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah dokumen RTBL dan jumlah pelaksanaan pembangunan strategis
	Intepretasi	:	<p>Nilai persentase tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di Kota Semarang semakin sesuai dengan arah kebijakan dan ketentuan dalam dokumen RTRW/RDTR, menandakan efektivitas pelaksanaan rencana tata ruang.</p> <p>Nilai rendah menunjukkan adanya deviasi atau ketidaksesuaian antara kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang, yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pemanfaatan ruang.</p>

Sumber Data	:	1. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Data hasil monitoring dan evaluasi tata ruang Peta pemanfaatan ruang aktual (citra satelit, survei lapangan, atau data sektoral) Dokumen RTRW dan RDTR Kota Semarang 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Laporan evaluasi penataan ruang daerah
Frekuensi	:	Tahunan (setiap akhir tahun anggaran)
Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase kegiatan/paket pembangunan (misalnya bangunan gedung, infrastruktur, pemanfaatan lahan/kawasan) yang dilaksanakan di wilayah Kota Semarang dan telah dinilai sesuai dengan arahan ruang dalam RTRW Kota Semarang pada tahun berjalan, dibandingkan dengan seluruh kegiatan/paket pembangunan yang terdata pada tahun tersebut. Yang dimaksud sesuai RTRW adalah: lokasi, peruntukan, dan/atau fungsi kegiatannya tidak bertentangan dengan pola ruang, struktur ruang, dan ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW (atau RDTR bila sudah ada).
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah SK KRK dibagi dengan permohonan KRK Pembilang: seluruh kegiatan/paket pembangunan (APBD, APBN, swasta, atau perizinan) yang telah melalui pemeriksaan/clearance tata ruang dan dinyatakan sesuai RTRW/RDTR. Penyebut: seluruh kegiatan/paket pembangunan yang masuk/terdata di Dinas Penataan Ruang pada tahun tersebut (yang seharusnya diperiksa kesesuaiannya).
	Intepretasi	:	Nilai semakin tinggi → semakin tertib pembangunan terhadap RTRW, dan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang berjalan baik. Nilai rendah → menunjukkan masih banyak pembangunan yang belum sesuai arahan ruang atau belum melalui proses kesesuaian tata ruang.
	Sumber Data	:	1. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (bidang pengendalian/pemanfaatan ruang): -register rekomendasi kesesuaian tata ruang / pertimbangan tata ruang, -daftar permohonan PBG/izin pemanfaatan ruang, -berita acara pemeriksaan kesesuaian. 2. Dokumen RTRW/RDTR Kota Semarang sebagai acuan.

	Frekuensi	:	Tahunan.
	Tipe Indikator	:	Positif

5	Perangkat Daerah	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
a	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana utilitas yang memadai
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Luas Kawasan Kumuh
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Perbandingan Luas Kawasan Kumuh pada tahun berkenaan dengan Luas Kawasan Kumuh dari SK Penetapan Kawasan Kumuh
	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}}{\text{Total luas kawasan kumuh sesuai SK Penetapan Kawasan Kumuh (ha)}} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Semakin kecil nilai → kondisi tata ruang & perumahan lebih baik; indikator penurunan kumuh.
	Sumber Data	:	BPS
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Negatif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Perbandingan antara perumahan dan kawasan permukiman layak huni dengan Luas seluruh perumahan permukiman Kota Semarang
	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Luas kawasan Layak Huni}}{\text{Total luas perumahan dan kawasan permukiman}} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → proporsi perumahan layak besar; target sosial terpenuhi.
	Sumber Data	:	Pendaftaran rumah, survei rumah layak, database Dinas Perumahan.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

6	Perangkat Daerah	:	Satuan Polisi Pamong Praja
a	Tujuan	:	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Keindahan Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	ukuran kuantitatif dalam skala 0–100 yang menunjukkan efektivitas pemerintah daerah (melalui Satpol PP) dalam menjaga kondisi masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Indeks dihitung berdasarkan data gangguan trantibum, efektivitas penanganan, kepatuhan masyarakat, dan persepsi publik.

Formulasi Perhitungan	:	$\frac{(Skor\ Gangguan + Skor\ Penanganan + Skor\ Kepatuhan + Skor\ Persepsi)}{4}$
Intepretasi	:	Skor tinggi → penyelenggaraan trantibum efektif; skor rendah → perlu perbaikan strategi.
Sumber Data	:	Laporan operasi Satpol PP, laporan pengaduan publik, data Polri/linmas, hasil survei.
Frekuensi	:	Triwulanan / Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat efektivitas penegakan peraturan daerah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Perbandingan antara Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dengan Jumlah pengaduan pelanggaran Perda yang masuk yang dinyatakan dalam persentase
	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang ditangani}}{\text{Jumlah penanganan pelanggaran Perda yang ditargetkan}} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Tinggi → penegakan Perda efektif; rendah → hambatan penegakan (administratif/koordinasi/dukungan hukum).
	Sumber Data	:	Sistem pengaduan/pelaporan Satpol PP, berita acara tindakan, laporan pengawas.
	Frekuensi	:	Triwulanan / Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

7	Perangkat Daerah	:	Dinas Pemadam Kebakaran
a	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase personel, kendaraan, dan peralatan pemadam kebakaran yang siap siaga sesuai standar operasional di suatu waktu tertentu. Ini mencakup kesiapan petugas (misalnya jumlah yang fit untuk bertugas) dan ketersediaan alat proteksi (sirene, alat pemadam, kendaraan). Indikator ini mengukur tingkat readiness unit pemadam kebakaran di daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	(Tingkat waktu tanggap kebakaran dan persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia + Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan + tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran + bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran)/4

Intepretasi	:	Nilai 100% berarti seluruh petugas dan peralatan berada dalam kondisi siap penuh. Nilai di bawah 100% menunjukkan adanya kekurangan sumber daya atau masalah logistik. Indikator ini penting untuk memastikan respon pemadam kebakaran optimal saat kejadian.
Sumber Data	:	Laporan kesiapsiagaan dan inventarisasi sarana/prasarana Dinas Pemadam Kebakaran atau Inspektorat Daerah. Karena tidak ada satuan baku di sumber terbuka, data biasanya diambil dari dokumentasi internal (laporan rutin kesiapsiagaan, audit sarana/prasarana, survei kesiapsiagaan petugas).
Frekuensi	:	Pengukuran dilakukan secara berkala, umumnya setiap triwulan atau setiap tahun sesuai kebutuhan perencanaan daerah
Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Tingkat waktu tanggap kebakaran adalah persentase kejadian kebakaran di wilayah yang ditangani dalam batas waktu tanggap standar (misalnya 15 menit sejak panggilan diterima). Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi mengukur rasio korban atau kondisi membahayakan manusia (kebakaran maupun non-kebakaran) yang berhasil diselamatkan terhadap total kejadian yang memerlukan evakuasi. Keduanya mencerminkan respons cepat Dinas Pemadam.
	Formulasi Perhitungan	:	$\left[\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit} + \text{jumlah kejadian kebakaran yang ditangani di Kota Semarang}}{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang terlaksana} + \text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang seharusnya diberikan}} \times 100\% \right] / 2$
Intepretasi	:	Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa hampir semua kejadian ditangani tepat waktu dan korban berhasil diselamatkan secara maksimal. Nilai rendah mengindikasikan perlunya peningkatan prosedur respon atau penambahan sumber daya. Standar response time biasanya diacu pada Permendagri terkait SPM kebakaran.	

Sumber Data	:	Laporan operasional kebakaran dan penyelamatan Dinas, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 sebagai acuan standart pelayanan minimal. Data waktu tanggap diambil dari catatan waktu panggilan dan kedatangan di lapangan. Data penyelamatan berasal dari laporan kejadian darurat.
Frekuensi	:	Dihitung dan dilaporkan setiap tahun (atau setiap periode Renstra) sebagai bagian dari evaluasi kinerja Dinas.
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase sarana dan prasarana Damkar (kendaraan, alat pemadam, APD, pos jaga, hydrant, peralatan rescue) yang memenuhi standar minimal Permendagri 114/2018.
	Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah target pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan / Jumlah realisasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan) x 100%
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan kesiapsiagaan pemadaman yang makin baik.
	Sumber Data	:	Inventarisasi Damkar, BMD, Bidang Sarpras
	Frekuensi	:	Semesteran / Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif	

d	Sasaran	:	Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase masyarakat umum dan relawan pemadam kebakaran yang terlibat secara aktif dalam program pencegahan atau respon kebakaran dibandingkan jumlah target. Misalnya, diukur sebagai rasio warga yang mengikuti pelatihan kebakaran atau tergabung dalam relawan terhadap total warga di wilayah rawan kebakaran.
	Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit oleh relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran/ Jumlah kejadian kebakaran di Kota Semarang) x 100%

Intepretasi	:	Persen yang tinggi menunjukkan masyarakat aktif mendukung tugas pemadam kebakaran (melalui pelatihan, kampanye keselamatan, atau bergabung sebagai relawan). Nilai rendah mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi atau kemudahan partisipasi. Indikator ini menilai kolaborasi masyarakat dalam mitigasi bahaya kebakaran.
Sumber Data	:	Catatan keikutsertaan dalam pelatihan atau program komunitas Dinas Pemadam Kebakaran, laporan kegiatan penyuluhan, atau data relawan. Jika tidak tersedia indikator baku, data dapat diperoleh dari Laporan Rencana Kerja Dinas atau survei internal.
Frekuensi	:	Dievaluasi setiap tahun saat membuat Laporan Kinerja Dinas atau Renstra, sejalan dengan kegiatan pembinaan masyarakat.
Tipe Indikator	:	Positif

e	Sasaran	:	Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase bangunan gedung di wilayah kerja yang telah memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran (misalnya APAR, alat pendeteksi asap, sistem hidrants, jalur evakuasi) sesuai peraturan daerah atau nasional. Gedung yang “memenuhi” berarti lulus inspeksi keselamatan kebakaran.
	Formulasi Perhitungan	:	(Bangunan Gedung yang diperiksa memenuhi persyaratan pemasangan peralatan proteksi kebakaran / jumlah pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran gedung yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran) x 100%
	Intepretasi	:	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kepatuhan pemilik gedung terhadap regulasi proteksi kebakaran. Nilai rendah menunjukkan banyak gedung belum aman dari risiko kebakaran sehingga perlu peningkatan penegakan standar. Indikator ini mengukur efektivitas pengawasan bangunan gedung di wilayah.
	Sumber Data	:	Hasil inspeksi kebakaran pada bangunan gedung (oleh Dinas Pemadam Kebakaran atau instansi terkait), sertifikat laik fungsi bangunan, atau data perizinan gedung. Referensi konsep serupa ada dalam dokumen teknis Pemadam Kebakaran daerah lain, meski tidak ada dokumen sumber baku, sehingga umumnya mengacu pada Perda/Permen tentang keselamatan bangunan.
	Frekuensi	:	Diukur tiap tahun atau setiap akhir periode Renstra sesuai jadwal inspeksi rutin Dinas Pemadam Kebakaran dan perencanaan audit bangunan.
	Tipe Indikator	:	Positif

8	Perangkat Daerah	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas penanganan bencana
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Ketahanan Daerah
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	Indeks komposit yang mengukur ketahanan daerah terhadap bencana, terdiri dari sub-indikator: mitigasi (kesiapan infrastruktur), kesiapsiagaan (SDM & logistik), respons (waktu & capaian), pemulihan (rekonstruksi).
	Formulasi Perhitungan	:	Indeks = $(\sum (\text{nilai sub-indikator} \times \text{bobot})) / \sum \text{bobot} \rightarrow$ dinormalisasi 0–100.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi \rightarrow daerah lebih tahan bencana; rendah \rightarrow rentan & perlu intervensi prioritas.
	Sumber Data	:	Analisis risiko/GRI, Peta Risiko GIS, laporan program mitigasi, database logistik.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya cakupan layanan penanganan bencana Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penanganan bencana
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi aksi respons (evakuasi, penyelamatan, distribusi bantuan, rehabilitasi awal) yang tercapai sesuai target rencana operasi terhadap total target rencana dalam periode.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah Target Respons yang Tercapai} / \text{Jumlah Target Respons yang Direncanakan}) \times 100\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi \rightarrow penanganan sesuai target; rendah \rightarrow ada gap kapasitas/koordinasi.
	Sumber Data	:	Laporan operasi BPBD, posko, after action report (AAR).
	Frekuensi	:	Per Kejadian / Triwulanan agregat
	Tipe Indikator	:	Positif

9	Perangkat Daerah	:	Dinas Sosial
a	Tujuan	:	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dibandingkan jumlah Penduduk Kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun
	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Semarang}} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi \rightarrow cakupan pelayanan baik; rendah \rightarrow ada PPKS terabaikan.
	Sumber Data	:	Registrasi PPKS Dinas, survei lapangan, data Puskesmas/kelurahan.
	Frekuensi	:	Triwulanan / Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Semarang
	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Kasus PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PPKS Kota Semarang}} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → respons penanganan efektif; rendah → backlog penanganan.
	Sumber Data	:	Sistem kasus Dinsos, laporan puskesmas, notulen penanganan.
	Frekuensi	:	Triwulanan
	Tipe Indikator	:	Positif

10	Perangkat Daerah	:	Dinas Tenaga Kerja
a	Tujuan	:	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pengangguran yang tertangani
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase pengangguran (menganggur terbuka usia kerja) yang tercatat menerima intervensi (pelatihan, penempatan kerja, magang, bantuan wirausaha) dari total pengangguran teridentifikasi dalam wilayah kerja.
	Formulasi Perhitungan	:	(Pencaker terdaftar yang ditempatkan + Peserta pelatihan yang terdaftar + Jumlah peserta JKK JKM Pekerja rentan) / Jumlah Pengangguran pada Tahun N (data BPS)
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → cakupan program penanganan pengangguran baik; rendah → banyak pengangguran tanpa intervensi.
	Sumber Data	:	BPS lokal, Sistem Bursa Kerja/Disnaker, data pelatihan.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase pencari kerja lokal (residen daerah) yang berhasil ditempatkan kerja melalui jasa penempatan Disnaker dibanding periode dasar.

Formulasi Perhitungan	:	$((\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tahun } N / \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar AK1 pada tahun } N) \times 100\%) - ((\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tahun } N-1 / \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar AK1 pada tahun } N-1) \times 100\%)$
Intepretasi	:	Jika dihitung rasio: nilai tinggi → penempatan efektif; jika pertumbuhan negatif → penurunan penempatan.
Sumber Data	:	Bursa Kerja, database penempatan, laporan perusahaan.
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi peserta pelatihan kewirausahaan yang memulai usaha formal atau informal dibanding total peserta pelatihan kewirausahaan.
	Formulasi Perhitungan	:	Persentase Peserta Pelatihan yang menjadi Wirausaha Baru tahun N - Persentase Peserta Pelatihan yang menjadi Wirausaha Baru tahun N-1
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → pelatihan menghasilkan wirausaha baru; rendah → perlu revisi materi & pendampingan.
	Sumber Data	:	Laporan pelatihan, survei follow-up peserta, registrasi UMKM.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi lowongan yang memenuhi kriteria kualitas (upah layak/UMK, kontrak formal, jaminan sosial, jam kerja sesuai standar, posisi berkesempatan berkembang) dari total lowongan yang terdaftar.
	Formulasi Perhitungan	:	Persentase Lowongan Pekerjaan Berkualitas Tahun N - Persentase Lowongan Pekerjaan Berkualitas Tahun N-1
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → pasar kerja menawarkan pekerjaan berkualitas; rendah → banyak lowongan informal/kurang layak.
	Sumber Data	:	Rekap lowongan Bursa Kerja, survey perusahaan, data Dinas Tenaga Kerja.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

e	Sasaran	:	Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi pencari kerja terdaftar yang telah ditransfer ke program pelatihan kerja dari jumlah pencari kerja yang mendaftar untuk program.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jml peserta pelatihan} / \text{Jml pendaftar pelatihan}) \times 100\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → akses pelatihan baik; rendah → kapasitas pelatihan terbatas.
	Sumber Data	:	Database peserta pelatihan, daftar pendaftaran bursa kerja.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

f	Sasaran	:	Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Perubahan persentase produktivitas (mis. output per pekerja atau nilai tambah per pekerja) dibanding periode dasar.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Nilai Produktivitas Tahun N} - \text{Nilai Produktivitas Tahun N-1}) / \text{Nilai Produktivitas Tahun N-1} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Positif → produktivitas meningkat; negatif → perlu intervensi produktivitas/multi-skill.
	Sumber Data	:	Survei produktivitas perusahaan, BPS, laporan klaster industri.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

g	Sasaran	:	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi sengketa/keluhan ketenagakerjaan (PHK, upah, perselisihan hubungan industrial) yang diselesaikan melalui mediasi/penanganan Dinas dari total kasus yang dilaporkan.
	Formulasi Perhitungan	:	$\text{Jml Kasus yang terselesaikan} / \text{Jml Kasus yang tercatat} \times 100\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → mekanisme penyelesaian efektif; rendah → perlu peningkatan kapasitas mediasi/hukum.
	Sumber Data	:	Sistem pengaduan Dinas, catatan mediasi/PHI.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

11	Perangkat Daerah	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a	Tujuan	:	Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks komposit yang mengukur kesenjangan gender pada aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik. IKG menggambarkan besarnya kerugian (loss) yang terjadi dalam pembangunan manusia akibat adanya ketimpangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja
	Formulasi Perhitungan	:	Hitung berdasarkan metode IKG nasional/regional (normalisasi subindikator dan agregasi bobot). IKG memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Angka 0 mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya, dan angka 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut
	Intepretasi	:	Nilai rendah → ketimpangan kecil; nilai tinggi → ketimpangan besar. Nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah (semakin membaik). Sebaliknya, nilai IKG yang semakin besar menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin tinggi (semakin memburuk).
	Sumber Data	:	Survei statistik, BPS, data DP3A. Di Indonesia, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diadaptasi dari GII (Gender Inequality Indeks)
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Negatif
b	Tujuan	:	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Skor yang mengukur tingkat keselarasan kinerja LKM terhadap prioritas pembangunan kota.

Formulasi Perhitungan	:	Rata-rata penilaian kriteria keselarasan (keterkaitan program, outcome, dukungan kebijakan). Diukur menggunakan 8 (delapan) unsur pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yaitu unsur sosial; unsur kesehatan; unsur lingkungan hidup; unsur pemenuhan infrastuktur; unsur ekonomi; unsur koordinasi dan kolaborasi; unsur partisipasi dan peran aktif; unsur efektifitas dan hasil kinerja
Intepretasi	:	Nilai tinggi → LKM sejalan dengan prioritas kota. Penghitungan dilakukan dengan self assessment dengan menggunakan Skala Likert untuk mengukur sikap atau persepsi, di mana 1 (Sangat Tidak Setuju/Puas/Buruk) hingga 5 (Sangat Setuju/Puas/Baik), dengan 3 sebagai titik Netral, atau bisa juga skala Numerik (1=Terendah, 5=Tertinggi)
Sumber Data	:	Laporan evaluasi LKM, fasilitasi DP3A. Masing-masing Lembaga Kemasyarakatan yang dibina oleh DP3A Kota Semarang yaitu PKK, Posyandu dan LPMK
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks yang mengukur tingkat pemberdayaan perempuan (akses ekonomi, partisipasi publik, pengambilan keputusan). Mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi.
	Formulasi Perhitungan	:	Agregasi subindikator pemberdayaan dengan bobot sesuai pedoman. Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → pemberdayaan perempuan baik. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan
	Sumber Data	:	Survei household, database program DP3A. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
	Formulasi Perhitungan	:	Pemetaan ini mengaplikasikan empat Klaster pemenuhan hak anak dan satu Klaster perlindungan khusus anak. Secara rinci Klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.
	Intepretasi	:	Semakin meningkatnya nilai indikator menggambarkan semakin membaiknya capaian indeks. Sebaliknya, indikator dikatakan memiliki arah negatif ketika nilai indikator yang semakin tinggi mengindikasikan semakin memburuknya capaian indeks.
	Sumber Data	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

e	Sasaran	:	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Skor komposit kinerja lembaga kemasyarakatan (kapasitas layanan, pelaporan, keberlanjutan program).
	Formulasi Perhitungan	:	Agregasi subindikator kinerja LKM dengan bobot. Diukur dengan Persentase pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan ditambah Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → LKM berkinerja baik. Penghitungan dilakukan dengan menggabungkan capaian indicator di level Program Adpem Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
	Sumber Data	:	Laporan monitoring LKM, hasil audit/pendampingan. DP3A Kota Semarang
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

12	Perangkat Daerah	:	Dinas Ketahanan Pangan
a	Tujuan	:	Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di wilayah.
	Formulasi Perhitungan	:	Skor Komposit Kabupaten/Kota ke-j = Σ (Bobot masing-masing indikator ke-j) x (Nilai hasil normalisasi masing-masing indikator ke-I pada kabupaten/kota ke-j) normalisasi ke skala 0–100.
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → ketahanan pangan baik; rendah → kerentanan tinggi.
	Sumber Data	:	Produksi Pangan Kementerian Pertanian; Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik; Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik; Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional; Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional; E-Monev Higiene Sanitasi Pangan Kementerian Kesehatan; Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Badan Pangan Nasional; Pola Pangan Harapan Badan Pangan Nasional; Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan; Survei Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas
	Indikator Kinerja Utama	:	Pola Pangan Harapan
	Satuan	:	Skor
	Definisi Operasional	:	Indeks pemenuhan mutu dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat, berdasarkan keragaman dan proporsi kontribusi energi dari berbagai kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan.
	Formulasi Perhitungan	:	Σ (Proporsi Skor AKE Kelompok Pangan x Bobot)
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → pola makan lebih sehat dan beragam; rendah → ketergantungan pangan pokok tinggi.
	Sumber Data	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya keamanan pangan
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat Keamanan Pangan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsisampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), dan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan/atau pengawasan, dibandingkan dengan total sampel yang diuji atau diawasi dalam periode tertentu.
	Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di suatu tempat sesuai standart yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu) x 100%
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → keamanan pangan terjaga; rendah → ada risiko konsumsi.
	Sumber Data	:	Hasil uji laboratorium dan pengawasan keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan
	Frekuensi	:	Triwulanan / Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

14	Perangkat Daerah	:	Dinas Lingkungan Hidup
a	Sasaran	:	Meningkatnya Kebersihan Kota
	Indikator Kinerja Utama	:	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi jumlah timbulan sampah yang masuk dan diolah di fasilitas pengolahan sampah (TPS 3R, TPST, fasilitas daur ulang, RDF, komposting, atau fasilitas pengolahan lainnya) melalui proses pengurangan, pemanfaatan kembali, dan/atau daur ulang, sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam periode berjalan dibandingkan dengan total timbulan sampah pada periode yang sama
	Formulasi Perhitungan	:	(Volume sampah diperkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan ditempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA) / Total timbulan sampah) x 100 %
	Intepretasi	:	Nilai meningkat → menunjukkan peningkatan kapasitas dan/atau optimalisasi pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah
	Sumber Data	:	Laporan operasional TPA, Laporan TPS 3R / TPST / fasilitas pengolahan sampah, Laporan Jakstrada
	Frekuensi	:	Bulanan / Triwulanan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kualitas Air
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (2 kali dalam setahun) dengan parameter kualitas meliputi (derajat keasaman (pH), Oksigen Terlarut (DO), Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD), Padatan Tersuspensi Total (TSS), Nitrat (N), Total Fosfat (P), dan Fecal Coliform.
	Formulasi Perhitungan	:	IKA Titik Pantau, Dimana : W = faktor pembobot I = Sub- Indeks (Q-Nilai) IKA titik pantau (penjumlahan dari sub total parameter (pH, BOD,COD, TSS, DO, NO3-N, T-P,fecal coli) / Jumlah titik pantau
	Intepretasi	:	Kategori 1. Sangat Baik $85 < x \leq 100$ 2. Sedang $60 < x \leq 85$ 3. Buruk $0 < x \leq 60$
	Sumber Data	:	Hasil uji laboratorium kualitas air
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kualitas Udara
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah nilai indeks yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien pada suatu wilayah administrasi dalam periode tertentu, yang diperoleh dari rata-rata hasil pengukuran konsentrasi partikulat halus (PM _{2.5}). Pengukuran dilakukan melalui pengambilan sampel udara selama 24 jam pada stasiun pemantauan udara ambien, dengan hasil pengukuran PM _{2.5} yang kemudian dirata-ratakan secara tahunan untuk mewakili kondisi kualitas udara wilayah tersebut
	Formulasi Perhitungan	:	Rata-rata Tahunan PM _{2.5} = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM _{2.5} dari 4 lokasi peruntukan lokasi pemantauan yang ditetapkan
	Intepretasi	:	Kategori 1. Baik $85 < x \leq 100$ 2. Sedang $60 < x \leq 85$ 3. Kurang $0 < x \leq 60$
	Sumber Data	:	Pemantauan stasiun kualitas udara ambien
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kualitas Lahan
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai indeks yang menggambarkan kondisi dan perubahan kualitas tutupan lahan pada suatu wilayah dalam periode tertentu, yang mencerminkan peningkatan atau penurunan kualitas lingkungan lahan akibat perubahan penggunaan dan tutupan lahan Lahan. IKL dihitung berdasarkan hasil pemantauan tutupan lahan yang diperoleh melalui metode penginderaan jauh menggunakan citra satelit, yang dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan tutupan lahan, seperti lahan terbuka menjadi pertanian lahan kering campur, hutan mangrove sekunder menjadi tambak, dan perubahan tutupan lahan lain yang berdampak terhadap kualitas lingkungan
	Formulasi Perhitungan	:	$IKTL = 100 [84,3 - (TL \times 100)] \times 100\%$
	Intepretasi	:	Kategori 1. Baik $85 < x \leq 100$ 2. Sedang $60 < x \leq 85$ 3. Kurang $0 < x \leq 60$
	Sumber Data	:	Citra satelit dan hasil analisis penginderaan jauh, Peta penggunaan/tutupan lahan berbasis SIG (GIS), Data survei lapangan (ground check), Data pendukung dari instansi terkait
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

15	Perangkat Daerah	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	<p>((Jumlah penduduk ber KTP/Jumlah penduduk wajib KTP x 100%) + (Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK/Jumlah kepala keluarga x100%) + (Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx100%) + (Jumlah Akta kematian yang diterbitkan/Jumlah kematian penduduk di di tahun nx100%) + (Jumlah KIA yang diterbitkan / jumlah anak usia -17 tahun yang kurang 1 hari x100%)) / 5.</p> <p>Merupakan rata-rata dari beberapa capaian :</p> <p>a. Persentase Perekaman KTP-el</p> <p>b. Persentase Kepemilikan KIA</p> <p>c. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga</p> <p>d. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun</p> <p>e. Persentase Kepemilikan Akta KematianRata-rata dari 5 sub-indikator: perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, kepemilikan KK, kepemilikan akta kelahiran (0-18), kepemilikan akta kematian terhadap jumlah relevan populasi.</p>
	Formulasi Perhitungan	:	<p>$(a+b+c+d+e)/5$ di mana</p> <p>$a=(\text{Jml_Perekaman_KTP}/\text{Jml_WajibKTP})\times 100\%$</p> <p>$b=(\text{Jml_KIA}/\text{Jml_Anak_0_17})\times 100\%$</p> <p>$c=(\text{Jml_KK}/\text{Jml_KepalaKeluarga})\times 100\%$</p> <p>$d=(\text{Jml_AktaKelahiran_0_18}/\text{Jml_0_18})\times 100\%$</p> <p>$e=(\text{Jml_AktaKematian_Terbit}/\text{Jml_Kematian})\times 100\%$</p>
Intepretasi	:	Nilai mendekati 100% → cakupan administrasi lengkap; nilai rendah → ada kelompok tanpa dokumen.	
Sumber Data	:	SIAK / Database Dukcapil, Data Keluarga (KK), Catatan Sipil, Dinas Kesehatan (kematian).	
Frekuensi	:	Tahunan / Triwulanan untuk monitoring progres	
Tipe Indikator	:	Positif	

b	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat kinerja pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Rata-rata dari: persentase data kependudukan yang terkelola & persentase OPD yang memanfaatkan data berdasarkan MoU.

Formulasi Perhitungan	:	$((Jml_DataTerkelola / Jml_DataAgregat)*100 + (Jml_OPD_Memanfaatkan / Jml_OPD_Target)*100) / 2.$
Intepretasi	:	Nilai tinggi → sistem SIAK & pemanfaatan data baik; rendah → perlu sinkronisasi & integrasi data.
Sumber Data	:	SIAK, log update data, daftar MoU/permintaan data OPD.
Frekuensi	:	Triwulanan
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi tempat layanan (Kantor Kecamatan / Kelurahan / Unit Layanan) yang memiliki SIAK operasional dari total tempat layanan yang wajib memiliki SIAK.
	Formulasi Perhitungan	:	$(Jml_Tempat_dgn_SIAK / Jml_Tempat_Wajib) * 100%$
	Intepretasi	:	Tinggi → layanan terintegrasi & data konsisten; rendah → ada titik layanan offline atau data terputus.
	Sumber Data	:	Daftar unit layanan, log SIAK, monitoring IT.
	Frekuensi	:	Triwulanan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase peningkatan pemanfaatan profil kependudukan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase profil kependudukan (profil terbit dalam bentuk dataset/profile) yang digunakan di program/analisis OPD dari total profil yang disusun.
	Formulasi Perhitungan	:	$(Jml_Profile_Dimanfaatkan / Jml_Profile_Tersusun) * 100%$
	Intepretasi	:	Tinggi → data dipakai untuk perencanaan; rendah → data jarang dimanfaatkan.
	Sumber Data	:	Log permintaan data, MoU, laporan OPD.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

16	Perangkat Daerah	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a	Tujuan	:	Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga
	Formulasi Perhitungan	:	<p>: dimensi ke- i ; k : banyaknya dimensi; dan i = 1, 2, 3..</p> <p>D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1, 2, ..., 6.</p> <p>D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j= 1, 2, ..., 7.</p> <p>D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah: Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana j = 1, 2, ..., 4.</p>
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → keluarga lebih sejahtera & resilient; rendah → perlu intervensi kelompok keluarga.
	Sumber Data	:	Rilis BKKBN
Frekuensi	:	Tahunan	
Tipe Indikator	:	Positif	

b	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk
	Indikator Kinerja Utama	:	Total Fertility Rate (TFR)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15–49 tahun).
	Formulasi Perhitungan	:	Perhitungan demografi standar (sum ASFR × interval usia). Di Excel: $TFR = \sum(ASFR_{agegroup} \times width_{agegroup})$
	Intepretasi	:	TFR tinggi → fertilitas masih tinggi; TFR kecil → fertilitas rendah/mencapai replacement.

Sumber Data	:	Rilis BKKBN
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kesejahteraan keluarga
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks kebahagiaan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks subjektif berdasarkan survei kepuasan & kesejahteraan keluarga (aspek psikososial, hubungan keluarga, kepuasan hidup).
	Formulasi Perhitungan	:	Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana $j = 1, 2, \dots, 4$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → kesejahteraan psikososial keluarga baik.
	Sumber Data	:	Survey keluarga / KIE program / monitoring PKB.
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

17	Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan
a	Tujuan	:	Meningkatnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang
	Indikator Kinerja Utama	:	Rasio Konektivitas
	Satuan	:	Rasio
	Definisi Operasional	:	Tingkat pelayanan angkutan umum dalam trayek
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah Trayek Aktif/Jumlah Trayek yang Harus Terlayani
	Intepretasi	:	Tinggi --> Keterhubungan antar wilayah dengan pelayanan angkutan umum memadai Rendah --> aksesibilitas terhadap angkutan umum yang rendah
	Sumber Data	:	Dinas Perhubungan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase ruas jalan yang macet
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Proporsi ruas jalan (segmen terdefinisi) yang mengalami kondisi macet menurut kriteria kecepatan \leq threshold pada periode pelaporan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah_Ruas_Macet} / \text{Jumlah_Ruas_Total}) * 100\%$

Intepretasi	:	Semakin tinggi → masalah kemacetan luas; rendah → lalu lintas lancar.
Sumber Data	:	Hasil survei lapangan, Dinas PUPR
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Negatif

18	Perangkat Daerah	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian
a	Tujuan	:	Meningkatnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pemerintah Digital
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Ukuran kematangan penerapan layanan pemerintahan berbasis digital meliputi layanan, infrastruktur, data, keamanan, dan SDM.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor tiap aspek} \times \text{ bobot}) / \Sigma \text{ bobot} \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan implementasi transformasi digital pemerintahan berjalan baik.
	Sumber Data	:	Laporan SPBE, audit TI, survei e-Gov
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Persentase ketersediaan informasi publik sesuai ketentuan UU No.14/2008 yang disampaikan melalui kanal resmi PPID.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah item informasi tersedia} / \text{total item wajib}) \times 100\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang baik.
	Sumber Data	:	Portal PPID, laporan PPID
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pembangunan Statistik
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Ukuran kinerja penyelenggaraan statistik sektoral daerah meliputi kelengkapan, keterbaruan, dan kualitas data.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor komponen pembangunan statistik} / \text{jumlah komponen}) \times 100$

Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan kesiapan data statistik sektoral untuk kebijakan publik.
Sumber Data	:	Portal data, laporan statistik sektoral
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya keamanan data dan informasi
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Keamanan Informasi
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Ukuran tingkat penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) di lingkungan Pemerintah Kota.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{ skor aspek keamanan} / \text{ total aspek}) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan sistem keamanan informasi terlaksana baik.
	Sumber Data	:	Audit keamanan TI, laporan SMKI
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

19	Perangkat Daerah	:	Dinas koperasi dan Usaha Mikro
a	Tujuan	:	Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif
	Indikator Kinerja Utama	:	Rasio Kewirausahaan Daerah
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap/tidak di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah Wirausaha} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$.
	Intepretasi	:	“Rasio Kewirausahaan Daerah” yang diukur dengan membandingkan jumlah wirausaha (pemula dan mapan) dengan jumlah angkatan kerja di daerah tersebut
	Sumber Data	:	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/kota
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya koperasi aktif dan sehat
	Indikator Kinerja Utama	:	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun
	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Volume usaha koperasi}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ <p>Volume usaha koperasi di sini adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa koperasi dalam suatu periode tertentu.</p>
	Intepretasi	:	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut
	Sumber Data	:	BPS
	Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif	

c	Sasaran	:	Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Usaha mikro naik kelas adalah usaha mikro yang dibina mengalami peningkatan kapasitas produksi dan SDM, penggunaan digitalisasi, perluasan akses pemasaran, legalitas usaha dan produk, inovasi produk dan layanan, akses permodalan dan manajemen keuangan, kemitraan dan jaringan bisnis, kontribusi sosial dan lingkungan, aset dan omset. Jumlah usaha Mikro merupakan jumlah pelaku usaha mikro yang terdaftar dalam sistem pendataan umkm pada dinas
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah Usaha mikro naik kelas yang dibina pada tahun n / jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100%

Intepretasi	:	semakin tinggi semakin baik; mencerminkan tata kelola kinerja yang kuat, keterkaitan anggaran-kinerja (value for money), orientasi hasil, dan perbaikan berkelanjutan. Untuk tren antar-tahun, bandingkan menggunakan pedoman evaluasi yang sama.
Sumber Data	:	Perhitungan Dinas
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

20	Perangkat Daerah	:	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a	Tujuan	:	Meningkatnya Penanaman Modal
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Menggambarkan laju kenaikan/penurunan nilai realisasi penanaman modal di wilayah (akumulasi PMDN + PMA) pada periode berjalan dibanding periode sebelumnya, sehingga memotret dinamika iklim investasi dan efektivitas promosi/kemudahan berusaha di daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{(\text{Nilai realisasi investasi}_t - \text{Nilai realisasi investasi}_{t-1})}{\text{Nilai realisasi investasi}_{t-1}} \times 100\%$ Catatan teknis: 1. Gunakan nilai realisasi (bukan rencana), konsisten satuan (Rp miliar). 2. Pilih basis y-on-y (tri I thn t vs tri I thn t-1) atau tahun-ke-tahun (thn t vs thn t-1) dan terapkan konsisten. 3. Jika $t-1=0$, laporkan pertumbuhan tak terdefinisi dan tampilkan nilai absolutnya.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi semakin baik; pertumbuhan positif menandakan peningkatan minat & eksekusi investasi. Baca bersama komposisi sektor, skala proyek, dan sebaran lokasi untuk memahami kualitas pertumbuhan (menghindari bias satu proyek besar).
	Sumber Data	:	Perhitungan Dinas (Rilis Data Kementerian Investasi/BKPM)
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang
	Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)
	Satuan	:	Rupiah
	Definisi Operasional	:	Total nilai investasi yang benar-benar terealisasi di wilayah pada periode pelaporan, mencakup PMA dan PMDN sebagaimana dilaporkan melalui LKPM/OSS-RBA dan telah divalidasi. Menggambarkan skala aktual eksekusi penanaman modal (bukan komitmen/rencana) yang terjadi di daerah.

Formulasi Perhitungan	:	$Realisasi_t = \Sigma \text{ nilai realisasi proyek PMA}_t + \Sigma \text{ nilai realisasi proyek PMDN}_t$ (setelah verifikasi periode t) Aturan hitung singkat: 1. Gunakan nilai realisasi (capex/biaya aktual), bukan rencana. 2. Proyek dihitung berdasarkan lokasi fisik di wilayah (hindari dobel hitung lintas lokasi). 3. Kenaikan/ekspansi masuk pada periode saat realisasi terjadi. 4. PMA yang dilapor dalam USD dikonversi sesuai ketentuan sistem; sajikan keluaran dalam Rp miliar untuk konsistensi. 5. Berkas batal/ditarik tidak dihitung.
Intepretasi	:	Semakin tinggi semakin baik, menandakan meningkatnya eksekusi investasi. Untuk kualitas, lengkapi dengan jumlah proyek, tenaga kerja terserap, sebaran sektor & kecamatan, serta porsi investasi hijau/berkelanjutan agar tidak bias oleh satu proyek besar.
Sumber Data	:	Perhitungan Dinas
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

21	Perangkat Daerah	:	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
a	Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pemuda dalam Pembangunan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Kualitas Pemberdayaan Pemuda
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Ukuran mutu program pemberdayaan pemuda yang diselenggarakan/diampu DISPORA pada tahun berjalan, dilihat dari inklusivitas peserta, partisipasi & retensi, peningkatan kapabilitas, keluaran-aksi nyata, keberlanjutan & jejaring, tata kelola-Monev, serta kepuasan peserta. Diukur dengan indeks komposit berbobot berbasis rubrik dan bukti sah.

Formulasi Perhitungan	:	<p>Nilai = $\Sigma (\text{bobot}_i \times \text{skor}_i)$, dengan setiap skor_i pada skala 0–100 dan Σ bobot = 100%. Rekomendasi komponen & bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusivitas & Relevansi Peserta (20%): keterjangkauan usia 16–30, keterwakilan perempuan/penyandang disabilitas/kelompok rentan sesuai target, kesesuaian profil peserta dengan tujuan program. 2. Partisipasi & Retensi (15%): % hadir minimal (mis. $\geq 75\%$ sesi), kelulusan/penyelesaian modul. 3. Peningkatan Kapabilitas (20%): pre–post test kompetensi (kepemimpinan, wirausaha, literasi digital, organisasi); Skor = $((\text{post} - \text{pre}) / (\text{maks} - \text{pre})) \times 100$ (dibatasi 0–100). 4. Output ke Aksi Nyata (20%): proporsi alumni yang menindaklanjuti (projek sosial/komunitas aktif, jabatan organisasi, atau usaha berjalan ≥ 3 bulan). 5. Keberlanjutan & Jejaring (10%): keberlanjutan mentoring ≥ 3–6 bulan, kemitraan aktif (OKP, sekolah/kampus, dunia usaha), pemanfaatan sarpras. 6. Tata Kelola & Monev (10%): dokumen perencanaan (TOR/RAB), SOP, keselamatan acara, pelaporan tepat waktu, eviden & data trail rapi. 7. Kepuasan Peserta (5%): IKM/NPS peserta yang terukur sah. <p>Catatan: tetapkan rubrik nilai per komponen di SK Kepala Dinas (mis. ambang 0/50/75/100) dan gunakan eviden</p>
Intepretasi	:	semakin tinggi semakin baik; mencerminkan program yang inklusif, efektif, berkelanjutan, dan berorientasi hasil. Disarankan predikat: A ≥ 90 , B 80–<90, C 70–<80, D < 70. Untuk komparasi antar-tahun, pertahankan bobot, rubrik, dan instrumen yang sama.
Sumber Data	:	Perhitungan Dinas
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dalam Masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif dan Pemuda Diberdayakan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	mengukur dua capaian kunci DISPORA: (a) proporsi Organisasi Kepemudaan (OKP/karang taruna/komunitas pemuda) yang aktif (memenuhi kriteria administrasi & operasional pada tahun berjalan), dan (b) proporsi pemuda peserta program yang “diberdayakan” (lulus program dan menunjukkan aksi lanjutan terverifikasi—mis. memimpin kegiatan sosial/organisasi, menjalankan usaha/pekerjaan, atau proyek komunitas aktif ≥ 3 bulan). Nilai indikator dapat disajikan per komponen dan/atau sebagai komposit.

Formulasi Perhitungan	:	<p>1. OKP Aktif (%) = (Jumlah OKP yang memenuhi kriteria aktif / Jumlah OKP terdaftar) × 100</p> <p>Kriteria aktif (ringkas): legalitas & kepengurusan sah; program kerja berjalan (≥2 kegiatan/semester atau sesuai SK); rapat/laporan periodik; keanggotaan aktif (mis. ≥20% hadir rata-rata).</p> <p>2. Pemuda Diberdayakan (%) = (Jumlah pemuda peserta yang lulus + punya aksi lanjutan terverifikasi / Jumlah pemuda peserta yang dievaluasi) × 100</p> <p>Aksi terverifikasi: bukti jabatan/penugasan OKP, BA kegiatan komunitas, NIB/sku/marketplace/omzet (wirausaha), kontrak/penempatan kerja, atau dokumentasi program yang berkelanjutan ≥3–6 bulan; disertai pre–post peningkatan kompetensi bila tersedia.</p> <p>3. Indikator Komposit (%) (opsional) = $w_1 \times \text{OKP Aktif} (\%) + w_2 \times \text{Pemuda Diberdayakan} (\%)$, dengan $w_1 + w_2 = 100\%$ (default disarankan: $w_1=50\%$, $w_2=50\%$; tetapkan dalam SK Kepala Dinas).</p>
Intepretasi	:	semakin tinggi semakin baik; menunjukkan ekosistem organisasi pemuda yang hidup dan program pemberdayaan yang berdampak. Untuk transparansi, laporkan kedua komponen terpisah di samping nilai komposit. Jaga konsistensi rubrik & bukti antar-tahun agar hasil komparabel.
Sumber Data	:	Perhitungan Dinas
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya prestasi olahraga daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase prestasi olahraga daerah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Menunjukkan derajat capaian prestasi olahraga daerah pada tahun/periode berjalan dibanding target resmi yang telah ditetapkan dalam rencana prestasi (kalender kejuaraan). Prestasi dioperasionalkan sebagai medali/podium/poin kejuaraan yang diakui panitia resmi pada level kab/kota, provinsi, nasional, hingga internasional untuk cabang/nomor yang dibina.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Poin prestasi terealisasi} / \text{Target poin prestasi}) \times 100\%$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi semakin baik; ≥100% berarti melampaui target prestasi. Untuk mutu analisis, tampilkan juga capaian per cabor, tingkat event (prov/nas/internasional), serta rasio emas dari total medali agar tidak bias oleh dominasi perunggu.
	Sumber Data	:	Perhitungan Dinas
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Negatif

22	Perangkat Daerah	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a	Tujuan	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan serta retribusi jasa usaha dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD TBRS, UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Museum Kota Lama, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%.
	Intepretasi	:	semakin tinggi semakin baik, menunjukkan daya dorong sektor budaya–pariwisata–ekraf terhadap PAD. Untuk kendali mutu analisis, sajikan pula struktur kontribusi per objek (hotel, restoran, hiburan, retribusi DTW), tren YoY, musiman (peak season) dan elastisitas terhadap kunjungan/TPK.
	Sumber Data	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah
	Frekuensi	:	Triwulan
Tipe Indikator	:	Positif	

b	Sasaran	:	Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.

Formulasi Perhitungan	:	Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota
Intepretasi	:	semakin tinggi semakin baik, menunjukkan daya dorong subsektor kebudayaan pada PAD. Sajikan rincian kontribusi per objek (museum, sewa gedung, event budaya), tren YoY, dan musiman (festival/pekan budaya) untuk analisis yang lebih tajam.
Sumber Data	:	Dinas Kebudayaan Pariwisata
Frekuensi	:	Triwulan
Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Kemajuan Kebudayaan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai Kemajuan Kebudayaan adalah nilai yang menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memajukan kebudayaan daerah, sebagaimana diturunkan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.
	Formulasi Perhitungan	:	(Kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir x 39,47%) + (% satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan x 10,53%) + (Jumlah pengunjung tempat bersejarah x 13,16%) + (% Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan x 26,32%) + (Tingkat pemanfaatan perpustakaan + 10,52%).
	Intepretasi	:	semakin tinggi semakin baik; merefleksikan ekosistem budaya yang terlindungi, hidup, inklusif, dan berdaya ekonomi. Rekomendasi predikat: A \geq 90, B 80–<90, C 70–<80, D <70. Untuk banding antar-tahun/daerah, bekukan instrumen, definisi, dan bobot agar komparabel; tampilkan juga profil per dimensi untuk melihat area perbaikan.
	Sumber Data	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Frekuensi	:	Triwulan
Tipe Indikator	:	Positif	

d	Sasaran	:	Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi semakin baik, mencerminkan daya dorong pariwisata-ekraf terhadap PAD. Untuk analisis manajerial, sajikan struktur kontribusi per objek (hotel, restoran, hiburan, retribusi DTW), tren YoY & musiman (peak season/event), serta korelasi dengan indikator pariwisata (TPK, kunjungan, ALOS).
	Sumber Data	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah
	Frekuensi	:	Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

23	Perangkat Daerah	:	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
a	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks pembangunan literasi masyarakat
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Mengukur tingkat kemampuan dan kebiasaan literasi masyarakat (membaca, menulis, mengakses informasi).
	Formulasi Perhitungan	:	$((0.30 \times \text{dimensi kepatuhan}) + (0.70 \times \text{dimensi kinerja})) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan masyarakat memiliki budaya literasi yang baik.
	Sumber Data	:	Survei literasi masyarakat, data Perpunas, Disarpus
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Mengukur tingkat kepatuhan OPD terhadap standar pengelolaan arsip.
	Formulasi Perhitungan	:	Berdasarkan Hasil Perhitungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan tata kelola arsip pemerintah terjaga.
	Sumber Data	:	Laporan audit kearsipan, ANRI
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Mengukur intensitas dan minat baca masyarakat melalui survei nasional dan lokal
	Formulasi Perhitungan	:	$((0.15 \times \text{pra membaca}) + (0.50 \times \text{saat membaca}) + (0.35 \times \text{pasca membaca})) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan budaya membaca yang kuat.
	Sumber Data	:	Survei kegemaran membaca
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat ketersediaan arsip
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ditambah persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ditambah persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ditambah persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip} + \text{persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip} + \text{persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik} + \text{persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}) / 4$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan efektivitas pengelolaan arsip dinamis.
	Sumber Data	:	Database arsip, laporan layanan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

24	Perangkat Daerah	:	Dinas Perikanan
a	Tujuan	:	Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai produksi perikanan dan kelautan
	Satuan	:	Rupiah
	Definisi Operasional	:	Nilai total produksi sektor perikanan dan kelautan di Kota Semarang selama satu tahun, mencakup tangkap, budidaya, dan pengolahan.
	Formulasi Perhitungan	:	Σ (Volume produksi per komoditas \times Harga jual rata-rata per komoditas)
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan meningkatnya kontribusi ekonomi sektor perikanan dan kelautan daerah.
	Sumber Data	:	Data Dinas Perikanan, BPS, laporan pelaku usaha
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai produksi perikanan tangkap
	Satuan	:	Rupiah
	Definisi Operasional	:	Nilai hasil produksi kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dalam satu tahun.
	Formulasi Perhitungan	:	Σ (Volume ikan tangkap \times Harga rata-rata per kg)
	Intepretasi	:	Meningkatnya nilai menandakan efisiensi dan hasil tangkapan nelayan membaik.
	Sumber Data	:	Laporan TPI, data nelayan, statistik perikanan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai produksi perikanan budidaya
	Satuan	:	Rupiah
	Definisi Operasional	:	Nilai produksi kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, air payau, dan laut dalam satu tahun.
	Formulasi Perhitungan	:	Σ (Volume hasil panen \times Harga jual rata-rata)
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan produktivitas pembudidayaan ikan meningkat.
	Sumber Data	:	Laporan kelompok pembudidaya ikan, BPS, Data Dinas Perikanan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

25	Perangkat Daerah	:	Dinas Pertanian
a	Tujuan	:	Meningkatnya daya saing sektor pertanian
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai produksi pertanian
	Satuan	:	Rupiah
	Definisi Operasional	:	Nilai ekonomi dari seluruh hasil pertanian yang dihasilkan dalam satu tahun (harga komoditas dikalikan dengan jumlah produksi dalam satu tahun)
	Formulasi Perhitungan	:	Σ (Volume produksi \times Harga di tingkat petani) per komoditas
	Intepretasi	:	Naik \rightarrow kontribusi ekonomi pertanian meningkat; turun \rightarrow perlu intervensi produksi
	Sumber Data	:	Laporan produksi Dinas
	Frekuensi	:	Bulanan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian
	Indikator Kinerja Utama	:	Rata-rata produktivitas tanaman pangan
	Satuan	:	Ton/ha
	Definisi Operasional	:	Jumlah hasil produksi (setara ton gkp) Padi, Jagung, Singkong dibagi dengan luas panen (dalam ha) Padi, Jagung, dan Singkong per tahun
	Formulasi Perhitungan	:	Total produksi (ton) / Total luas panen (ha)
	Intepretasi	:	Nilai lebih tinggi \rightarrow semakin efisien penggunaan lahan dalam menghasilkan produksi tanaman pangan; Turun \rightarrow menurunnya efisiensi penggunaan lahan dalam menghasilkan produksi tanaman pangan.
	Sumber Data	:	Laporan produksi dan luas panen Dinas
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian
	Indikator Kinerja Utama	:	Rata-rata produktivitas tanaman hortikultura
	Satuan	:	Kuintal/ ha
	Definisi Operasional	:	Jumlah hasil produksi (dalam kwintal) Cabai, Bawang Merah, Tomat, Terong dibagi dengan luas panen (dalam ha) Cabai, Bawang Merah, Tomat, Terong per tahun
	Formulasi Perhitungan	:	Total produksi (kwintal) / Total luas panen (ha)
	Intepretasi	:	Kenaikan menunjukkan perbaikan teknik budidaya.
	Sumber Data	:	Laporan Dinas
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian
	Indikator Kinerja Utama	:	Rata-rata produktivitas hasil peternakan
	Satuan	:	Kg/ ekor
	Definisi Operasional	:	Rata-rata produktivitas telur, daging ayam, dan daging sapi (dalam kg per ekor)
	Formulasi Perhitungan	:	Total produksi (kg) / Jumlah ternak (ekor)
	Intepretasi	:	Meningkat menunjukkan peningkatan manajemen ternak.
	Sumber Data	:	Laporan Dinas
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

26	Perangkat Daerah	:	Dinas Perdagangan
a	Tujuan	:	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	LPE Sektor Perdagangan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) khusus subsektor perdagangan yang mengukur pertumbuhan nilai tambah perdagangan daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	(Nilai tambah perdagangan tahun t / nilai tambah perdagangan tahun t-1 - 1) × 100 → diubah menjadi indeks jika diperlukan
	Intepretasi	:	Nilai positif tinggi = subsektor perdagangan tumbuh; negatif = kontraksi.
	Sumber Data	:	BPS lokal, SKPD Statistik, Laporan PDRB
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai PDRB Perdagangan
	Satuan	:	Milyar Rupiah
	Definisi Operasional	:	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB daerah (nilai tambah sektor perdagangan).
	Formulasi Perhitungan	:	Σ nilai tambah subsektor perdagangan (Rupiah)
	Intepretasi	:	Nilai naik menandakan kontribusi ekonomi perdagangan meningkat.
	Sumber Data	:	BPS, SKPD terkait, laporan ekonomi daerah
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

27	Perangkat Daerah	:	Dinas Perindustrian
a	Tujuan	:	Meningkatnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung penambahan nilai ekonomi sektor perdagangan dan jasa
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai PDRB Sektor Industri
	Satuan	:	Milyar Rupiah
	Definisi Operasional	:	Nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang dalam satu tahun.
	Formulasi Perhitungan	:	Σ (Nilai tambah industri pengolahan)
	Intepretasi	:	Nilai meningkat menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah semakin besar.
	Sumber Data	:	BPS Kota Semarang, Dinas Perindustrian
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif
b	Sasaran	:	Meningkatnya daya saing IKM
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Laju pertumbuhan jumlah IKM aktif yang berorientasi pada sektor perdagangan dan jasa dibanding tahun sebelumnya.
	Formulasi Perhitungan	:	$((\text{Jumlah IKM tahun ini} - \text{Jumlah IKM tahun lalu}) / \text{Jumlah IKM tahun lalu}) \times 100$
	Intepretasi	:	Angka positif menunjukkan perkembangan IKM meningkat; negatif menunjukkan penurunan kinerja sektor industri kecil.
	Sumber Data	:	Database IKM Dinas Perindustrian, SIINas, BPS
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

28	Perangkat Daerah	:	Sekretariat Daerah
a	Tujuan	:	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Satuan	:	Nilai
	Definisi Operasional	:	Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB terhadap kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	Menggunakan formula penilaian resmi SAKIP (komposit berbagai komponen evaluasi).
	Intepretasi	:	Skor tinggi menunjukkan pemerintah daerah memiliki tata kelola kinerja yang baik dan akuntabel.
	Sumber Data	:	Hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB, LAKIP
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Satuan	:	Nilai
	Definisi Operasional	:	Skor penilaian kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan rata-rata nilai yang didapatkan dari: a. Peningkatan kinerja BUMD aspek layanan dan keuangan; b. tingkat efektifitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan; c. Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR; d. tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian; e. ITKP.
	Formulasi Perhitungan	:	$((ax20) + (bx20)+(cx20)+(dx20) + (ex20)) / 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi nilai, semakin efektif peran Sekda dalam kebijakan ekonomi & pembangunan.
	Sumber Data	:	Bappeda, laporan koordinasi kebijakan, Perekonomian, PBJ dan Adm Pembangunan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Tujuan	:	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pelayanan Publik
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	suatu upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik
	Formulasi Perhitungan	:	50% Tata Kelola + 50% Kepuasan Masyarakat
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan kualitas pelayanan publik meningkat.
	Sumber Data	:	Penilaian menggunakan Instrumen PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik), laporan pelayanan publik
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran 1	:	Meningkatnya tata kelola hukum
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Reformasi Hukum
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	Mengukur efektivitas fasilitasi hukum, pembinaan regulasi, sinkronisasi hukum oleh Sekretariat Daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	$f(x) = X_o + (X_{max} - X_o) .80\%$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan kualitas tata kelola hukum yang baik.
	Sumber Data	:	Bagian Hukum, laporan fasilitasi hukum
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

e	Sasaran 2	:	Meningkatnya pengelolaan kinerja pemerintah daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)
	Satuan	:	Nilai
	Definisi Operasional	:	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Kemendagri melalui EKPPD.
	Formulasi Perhitungan	:	Mengacu Pedoman Umum LPPD dari Kemendagri
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menandakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah baik.
	Sumber Data	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Aplikasi SILPPD, Kemendagri
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

f	Sasaran 3	:	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berstatus kinerja baik
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase kecamatan/kelurahan yang mencapai predikat "baik" pada evaluasi kinerja kecamatan/kelurahan
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah kecamatan/kelurahan berstatus baik} / \text{total kecamatan/kelurahan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan pemerataan kualitas kinerja wilayah.
	Sumber Data	:	Laporan evaluasi kinerja kecamatan/kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

g	Sasaran 4	:	Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat merupakan hasil dari terfasilitasinya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut: 90 ± 100 % = efektif 80 ± 90 % = cukup efektif 60 ± 80 % = kurang efektif kurang 60 % = tidak efektif
	Formulasi Perhitungan	:	(fasilitasi kegiatan yang terealisasi/target fasilitasi)*100%
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan program Kesra efektif dan terkoordinasi.
	Sumber Data	:	Bagian Kesra, laporan program Kesra
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

h	Sasaran 5	:	Meningkatnya efektivitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase BUMD yang mengalami peningkatan layanan publik & kinerja keuangan dibanding tahun sebelumnya.
	Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah BUMD meningkat dari sisi layanan publik dan kinerja keuangan / total BUMD) ×100
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → keberhasilan pembinaan BUMD meningkat.
	Sumber Data	:	Laporan BUMD, BPKAD, evaluasi kinerja BUMD, Bagian Perekonomian dan SDA
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

Sasaran 5	:	Meningkatnya efektifitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan
Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan
Satuan	:	%
Definisi Operasional	:	Persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT serta ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Efektifitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan dengan kriteria berikut: 90 ± 100 % = efektif 80 ± 90 % = cukup efektif 60 ± 80 % = kurang efektif kurang 60 % = tidak efektif
Formulasi Perhitungan	:	persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal & DBHCHT + persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan : 2
Intepretasi	:	Nilai tinggi → kebijakan ekonomi & pembangunan berjalan efektif.
Sumber Data	:	Bappeda, laporan kebijakan, bagian administrasi pembangunan dan pereko SDA
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

Sasaran 5	:	Meningkatnya efektifitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan
Indikator Kinerja Utama	:	Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR
Satuan	:	Urusan
Definisi Operasional	:	Urusan/Program CSR yang mendukung prioritas pembangunan daerah (Sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2015)
Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah urusan/program prioritas didukung CSR / total urusan/program prioritas daerah) × 100
Intepretasi	:	Nilai tinggi → kolaborasi CSR berjalan baik.
Sumber Data	:	Laporan CSR, Pemerintah Daerah, perusahaan, Bagian Perekonomian dan SDA
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

Sasaran 5	:	Meningkatnya efektifitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan
Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian
Satuan	:	%
Definisi Operasional	:	Pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian merupakan hasil dari terfasilitasinya kegiatan pada bidang kelautan, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, kehutanan dan energi sumber daya mineral dengan kriteria sebagai berikut: 90 ± 100 % = efektif 80 ± 90 % = cukup efektif 60 ± 80 % = kurang efektif kurang 60 % = tidak efektif
Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah kegiatan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan yang direncanakan)*100
Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan kegiatan terkoordinasi dan berjalan dengan efektif
Sumber Data	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

i	Sasaran 6	:	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Tata Kelola Pengadaan
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	Indeks terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah sesuai dengan Surat Edaran LKPP No 4 tahun 2021
	Formulasi Perhitungan	:	ITKP = Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ
	Intepretasi	:	1. Istimewa Nilai 100 2. Sangat Baik Rentang nilai > 90 s.d < 100 3. Baik Rentang Nilai > 70 s.d 90 4. Cukup Rentang Nilai >= 50 s.d 70 5. Kurang Nilai < 50
	Sumber Data	:	LKPP, BPBJ
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

j	Sasaran 7	:	Meningkatnya kepuasan terhadap kinerja pelayanan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kota)
	Satuan	:	Indeks
	Definisi Operasional	:	Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik seluruh perangkat daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	$((\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}) \times 25$
	Intepretasi	:	$\geq 76,61 = \text{baik}; < 76,60 = \text{kurang baik.}$
	Sumber Data	:	Kompilasi Survei IKM OPD di lingkup pemerintah kota semarang
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

	Sasaran 8	:	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase peningkatan tingkat kepuasan pimpinan daerah terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	$((\text{Nilai kepuasan tahun ini} - \text{nilai dasar}) / \text{nilai dasar}) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan koordinasi & pelayanan internal meningkat.
	Sumber Data	:	Survei internal pimpinan, dokumentasi rapat
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

	Sasaran 8	:	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Ukuran efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan.
	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah Dokumen anggaran dan laporan keuangan yang berkualitas dibanding dengan jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan yang direncanakan dikali 100
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan tata kelola keuangan semakin efisien & akuntabel.
	Sumber Data	:	BPKAD, Bagian Keuangan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

	Sasaran 9	:	Tersedianya perencanaan yang berkualitas, akuntabel dan relevan pada Sekretariat Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Kesesuaian dokumen perencanaan Setda (Renstra, Renja) dengan dokumen kota (RPJMD, RKPD).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah dokumen sesuai} / \text{total dokumen}) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi → perencanaan Setda selaras dengan perencanaan kota.
	Sumber Data	:	Bappeda, dokumen RKPD/RPJMD, Bag Adm Pembangunan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

29	Perangkat Daerah	:	Sekretariat DPRD
a	Tujuan	:	Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Raperda menjadi Perda
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang berhasil ditetapkan menjadi Perda dalam satu tahun.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah Raperda ditetapkan menjadi Perda} / \text{total Raperda yang setuju}) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi menunjukkan efektivitas pembahasan legislasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
	Sumber Data	:	Dokumen Raperda & Perda, Risalah Sidang, Bagian Perundangan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Raperda yang disetujui DPRD
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase Raperda yang mendapat persetujuan DPRD setelah pembahasan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah Raperda yang disetujui} / \text{total Raperda dibahas}) \times 100$
	Intepretasi	:	Nilai tinggi berarti proses legislasi berjalan baik dan efektif.
	Sumber Data	:	Risalah persidangan, dokumen keputusan DPRD
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

30	Perangkat Daerah	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a	Tujuan	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai komponen perencanaan kinerja Pemerintah Kota dalam evaluasi SAKIP dari KemenPANRB, yang menilai kualitas perencanaan, indikator, dan keterukuran program.
	Formulasi Perhitungan	:	Agregat dari sub komponen keberadaan perencanaan kinerja, kualitas/mutu perencanaan kinerja, serta pemanfaatan perencanaan kinerja
	Intepretasi	:	Skor tinggi → kualitas perencanaan Pemkot baik
	Sumber Data	:	Nilai AKIP dari KemenPAN RB, Komponen Perencanaan Kinerja
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang Sinergis, Berkualitas, dan Selaras
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Mengadopsi pengukuran IPPN dengan beberapa penyesuaian
	Formulasi Perhitungan	:	Agregat dari nilai sinergi perencanaan + nilai kualitas perencanaan + nilai keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja
	Intepretasi	:	Skor tinggi → sinkronisasi & kualitas dokumen perencanaan baik
	Sumber Data	:	Bappeda
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

31	Perangkat Daerah	:	BPKAD Kota Semarang
a	Tujuan	:	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Kredibel
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Satuan	:	Nilai
	Definisi Operasional	:	Dimensi Transparansi: Dinilai berdasarkan Ketepatan waktu dan Keteraksesan dokumen pada website Jika sesuai ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen pada website masing-masing mendapat skor 1, jika tidak sesuai ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen pada website masing-masing mendapat skor 0 Dimensi Penyerapan Anggaran: Terdapat 2 indikator yaitu belanja operasi dan belanja modal Jika capaian belanja di atas 80% mendapat skor 1, jika capaian belanja di bawah 80% mendapat skor 0 Dimensi Opini BPK: Opini WTP 3 tahun berturut-turut diberi skor 1 Sumber: Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	Formulasi Perhitungan	:	Menggunakan indeks komposit hasil evaluasi pengelolaan keuangan
	Intepretasi	:	Skor tinggi → tata kelola keuangan daerah semakin baik.
	Sumber Data	:	Diolah BPKAD
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Opini BPK
	Satuan	:	Opini
	Definisi Operasional	:	Opini BPK atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	Berdasarkan hasil audit BPK
	Intepretasi	:	WTP = pengelolaan keuangan sangat baik, WDP/TMP = perlu perbaikan besar
	Sumber Data	:	Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

32	Perangkat Daerah	:	Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
a	Tujuan	:	Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah untuk menunjukkan kemandirian fiskal daerah.
	Formulasi Perhitungan	:	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah dikalikan 100%
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kemandirian keuangan daerah kuat.
	Sumber Data	:	LRA (BPKAD), Bapenda
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif
b	Sasaran	:	Meningkatnya pendapatan asli daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Tingkat realisasi penerimaan PAD dibandingkan target PAD dalam tahun anggaran.
	Formulasi Perhitungan	:	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%
	Intepretasi	:	Semakin mendekati 100% → kinerja pemungutan PAD optimal.
	Sumber Data	:	LRA (BPKAD), Bapenda
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif
33	Perangkat Daerah	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
a	Tujuan	:	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Sistem Merit
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks yang mengukur penerapan Sistem Merit (perencanaan, rekrutmen, promosi, kinerja, penggajian, disiplin) sesuai KASN (Diganti BKN).
	Formulasi Perhitungan	:	Mengacu metode penilaian Sistem KASN (Diganti BKN)
	Intepretasi	:	Skor tinggi → manajemen ASN profesional & bebas intervensi politik
	Sumber Data	:	Laporan BKN, dokumen kepegawaian
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif
b	Sasaran	:	Meningkatnya profesionalitas Kepegawaian ASN
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Profesionalitas ASN
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks profesionalitas ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin) sesuai PermenPANRB.

Formulasi Perhitungan	:	Rumus Indeks Profesionalitas ASN (komposit 4 aspek)
Intepretasi	:	Tinggi = kualitas SDM ASN meningkat
Sumber Data	:	Data SIASN, BKPP
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

34	Perangkat Daerah	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah
a	Tujuan	:	Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Inovasi Daerah
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks nasional yang mengukur kinerja inovasi Pemerintah Daerah pada aspek kebijakan, kapasitas, dan hasil inovasi sesuai KemenPAN-RB & Kemendagri.
	Formulasi Perhitungan	:	Mengacu Metodologi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → semakin inovatif & adaptif dalam pelayanan publik & pemerintahan.
	Sumber Data	:	Kemendagri, BRIDA, dokumentasi inovasi
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kapabilitas Inovasi
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kapabilitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi (SDM, organisasi, ekosistem inovasi, kemampuan R&D).
	Formulasi Perhitungan	:	Komposit seluruh variabel kapabilitas inovasi lembaga
	Intepretasi	:	Skor tinggi → kemampuan berinovasi semakin kuat & sistematis.
	Sumber Data	:	BRIN
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

35	Perangkat Daerah	:	Inspektorat
a	Tujuan	:	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah
	Indikator Kinerja Utama	:	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kematangan SPIP Pemkot dalam mencapai tujuan pengendalian yang dinilai berdasarkan 3 komponen penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai pedoman BPKP.
	Formulasi Perhitungan	:	Penilaian komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan pedoman BPKP

Intepretasi	:	Level 1 = Rintisan, Level 2 = Berkembang, Level 3 = Terdefinisi, Level 4 = Terkelola & Terukur, Level 5 = Optimum
Sumber Data	:	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance yang dikeluarkan oleh BPKP
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya peran pengawasan pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko
	Indikator Kinerja Utama	:	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	Satuan	:	Level
	Definisi Operasional	:	Tingkat kemampuan APIP dalam melaksanakan aktivitas pengawasan yang diukur berdasarkan 6 elemen sesuai pedoman BPKP
	Formulasi Perhitungan	:	Penilaian 6 elemen kapabilitas APIP oleh BPKP.
	Intepretasi	:	Level ≥ 3 menandakan pengawasan efektif dan APIP profesional
	Sumber Data	:	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance yang dikeluarkan oleh BPKP
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya peran pengawasan. pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko
	Indikator Kinerja Utama	:	Manajemen Risiko Indeks (MRI)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko Pemkot dinilai berdasarkan 3 komponen penilaian MRI sesuai pedoman BPKP
	Formulasi Perhitungan	:	Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko Pemkot berdasarkan pedoman BPKP
	Intepretasi	:	skor tinggi = penerapan manajemen risiko optimal
	Sumber Data	:	Level Manajemen Resiko Indeks (MRI) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance yang dikeluarkan oleh BPKP
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya peran pengawasan. pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko Pemkot dinilai berdasarkan 3 komponen penilaian MRI sesuai pedoman BPKP

Formulasi Perhitungan	:	Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko Pemkot berdasarkan pedoman BPKP
Intepretasi	:	Skor tinggi = risiko korupsi rendah & pencegahan berjalan.
Sumber Data	:	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance yang dikeluarkan oleh BPKP
Frekuensi	:	Tahunan
Tipe Indikator	:	Positif

36	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Semarang Selatan
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Selatan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

37	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Semarang Utara
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Utara
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Kecamatan Semarang Utara
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Utara
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

38	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Semarang Barat
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Barat
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Barat
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

39	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Semarang Timur
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Timur
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

40	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Semarang Tengah
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Tengah
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
		Tipe Indikator	:

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Tengah
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

41	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Gunungpati
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gunungpati
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gunungpati
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gunungpati
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

42	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Tugu
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tugu
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tugu
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

43	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Mijen
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Mijen
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Mijen
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

44	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Genuk
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Genuk
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Genuk
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Genuk
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

45	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Gajahmungkur
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gajahmungkur
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

46	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Tembalang
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tembalang
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tembalang
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tembalang
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

47	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Candisari
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Candisari
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Candisari
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Candisari
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

48	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Banyumanik
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Banyumanik
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Banyumanik
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Banyumanik
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

49	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Ngaliyan
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Ngaliyan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Ngaliyan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

50	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Gayamsari
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gayamsari
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{Skor unsur layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gayamsari
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gayamsari
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

51	Perangkat Daerah	:	Kecamatan Pedurungan
a	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Pedurungan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas layanan publik kecamatan (administrasi kependudukan, perizinan, rekomendasi, pelayanan sosial).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\Sigma \text{ Skor unsur layanan} / \text{ Skor maksimum}) \times 100$
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kualitas layanan publik kecamatan semakin baik.
	Sumber Data	:	Survei internal, Survei Masyarakat, Laporan Layanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks penilaian terhadap keberfungsian lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMK, PKK, Karang Taruna).
	Formulasi Perhitungan	:	Skor komposit pembinaan, partisipasi, dan keberfungsian lembaga.
	Intepretasi	:	Semakin tinggi → kapasitas kelembagaan masyarakat semakin baik.
	Sumber Data	:	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Pedurungan
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Pedurungan
	Satuan	:	%
	Definisi Operasional	:	Persentase layanan publik kecamatan yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan (SLA).
	Formulasi Perhitungan	:	$(\text{Jumlah layanan selesai tepat waktu} / \text{total layanan}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → pelayanan publik efektif & efisien.
	Sumber Data	:	Laporan Pelayanan Kecamatan
	Frekuensi	:	Bulanan/Triwulan
	Tipe Indikator	:	Positif

d	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Utama	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, pembinaan, dan peran lembaga kemasyarakatan.
	Formulasi Perhitungan	:	$(\sum \text{ skor} / \text{ skor maksimal}) \times 100$
	Intepretasi	:	Tinggi → lembaga kemasyarakatan dinilai berfungsi baik.
	Sumber Data	:	Survei Kecamatan & Kelurahan
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

52	Perangkat Daerah	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a	Tujuan	:	Meningkatnya peran masyarakat dalam demokrasi
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Demokrasi
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara - dengan dasar perhitungan diukur dari 3 (tiga) aspek,yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.
	Formulasi Perhitungan	:	Mengacu metode Indeks Demokrasi Nasional/BPS
	Intepretasi	:	Skor tinggi → kualitas demokrasi baik
	Sumber Data	:	BPS, Bakesbangpol
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

b	Sasaran	:	Meningkatnya kondusifitas wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)
	Satuan	:	Kasus
	Definisi Operasional	:	Total konflik sosial akibat isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam 1 tahun.
	Formulasi Perhitungan	:	Menghitung jumlah kasus konflik SARA
	Intepretasi	:	Semakin rendah → stabilitas daerah meningkat
	Sumber Data	:	Laporan Intelijen Daerah, Bakesbangpol
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif

c	Sasaran	:	Meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kebebasan
	Satuan	:	Angka
	Definisi Operasional	:	Ukuran kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan di suatu daerah
	Formulasi Perhitungan	:	Mengacu pada metode pengukuran Indeks Kebebasan sebagai salah satu aspek penyusun Indeks Demokrasi
	Intepretasi	:	Skor tinggi → kebebasan warga negara terjamin
	Sumber Data	:	Bawaslu, BPS, Bakesbangpol
	Frekuensi	:	Tahunan
	Tipe Indikator	:	Positif



WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI